

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

# LAKIP 2021



**DISHUB**  
POLEWALI MANDAR

## Kata Pengantar



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan detail kinerja dan keuangan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang terjabarkan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur tingkat pencapaian kinerja. Diharapkan, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja urusan Perhubungan bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Polewali Mandar, Februari 2022  
KEPALA DINAS

**Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 197403061993021001



# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis Dinas Perhubungan tahun 2019-2024. Ringkasan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar yang dihasilkan tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran : Meningkatnya kinerja transportasi dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas.

Tahun 2021, target 170 kejadian Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas), sementara Lakalantas yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 166 kasus, sehingga capaian kinerja 102%. Berdasarkan itu, maka angka Lakalantas Tahun 2021 mengalami penurunan 33% dari 223 kejadian pada tahun 2010.

Dari sisi fatalitas kejadian juga terjadi penurunan. Tahun 2021 terdapat penurunan jumlah korban meninggal dunia dari 40 korban pada tahun 2021 menurun menjadi 34 korban jiwa atau penurunan sampai pada angka 15%. Penurunan ini dampak dari mobilitas orang dan barang yang turun yang masih dalam kondisi Pandemi.

- b. Indikator Program : Persentase sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik

Sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik, target kinerja 90,11% dan realisasi 99,10%, dalam artian capaian kinerja mencapai 99,76%.

Tahun 2021, sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan target 893 unit, realisasi 885 unit. Jumlah ini naik dari tahun 2020 yang berjumlah 823 unit.

- c. Indikator Program : Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman

Pada Tahun 2021, Titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman, target kinerja 68.10% dan realisasi 70%, dalam artian capaian kinerja mencapai 102.19%. Jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar yakni 60 titik.

- d. Indikator Program : Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan.

pada tahun 2021, angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, target 51.31% realisasi 67.74% capaian kinerja 124.22%. Hal ini terdiri dari persentase kendaraan uji KIR, realisasi 80.43% dan pelayanan angkutan darat di terminal realisasi 46.99%.

- e. Indikator sasaran pada segmen manajemen perkantoran, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan : IKM dengan mutu pelayanan A (Baik), Predikat SAKIP BB dan Opini Keuangan WTP;

- f. Realisasi keuangan, PAGU anggaran sebesar Rp 1.902.243.924.00, realisasi Rp 1.902.061.250, atau terealisasi sebesar 99.99%. Alokasi ini merupakan hasil emi Covid-19 telah mengubah segala orientasi, termasuk

- g. Terdapat 15 kegiatan pada 2 program: *pertama*, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 Kegiatan Pertama : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kedua Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ketiga Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah keempat Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah kelima Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah keenam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ketujuh Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kedua Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan

kegiatan pertama Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota kedua Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ketiga Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C keempat Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kelima Pengujian Kendaraan Bermotor keenam Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota ketujuh Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan kedelapan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan. Untuk itu, fokus dan melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap berbagai stakeholder dalam menekan dan mengantisipasi lonjakan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR CHART .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud .....	3
D. Tujuan.....	3
E. Sumber Daya Manusia.....	4
F. Issu Strategis.....	8
G. Sistematika Penyajian.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategis .....	10
B. Penetapan Kinerja .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN .....</b>	<b>14</b>
A. Akuntabilitas Kinerja .....	14
B. Akuntabilitas Keuangan.....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## Daftar Tabel

II.1 Korelasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator .....	11
II.2 Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja .....	12
II.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan .....	13
III.1 Capaian Kinerja .....	15
III.2 Realisasi dan Refokushing Anggaran Persentase Saprasi .....	27
III.3 Titik Rawan Kecelakaan dan Kepadatan .....	33
III.4 Pengaturan Pengamanan Lalu Lintas .....	36
III.5 Titik Lokasi Parkir Tertib .....	41
III.6 Realisasi dan Refokushing Anggaran Persentase Titik Rawan .....	42
III.7 Kendaraan Laik Jalan .....	48
III.8 Kendaraan uji KIR .....	49
III.9 Layanan Angkutan Darat .....	53
III.10 Angkutan dan Penumpang Keluar-Masuk Terminal .....	53
III.11 Realisasi dan Refokushing Anggaran Persentase Angkutan Keselamatan ...	58
III.12 Hasil IKM dan RTL .....	64
III.13 Realisasi dan Refokushing Anggaran Indikator IKM .....	66
III.14 Realisasi dan Refokushing Anggaran Indikator Predikat SAKIP .....	69
III.15 Realisasi dan Refokushing Anggaran Indikator Opini Keuangan .....	72
III.16 Target dan Realisasi PAD .....	74
III.17 LRA Tahun 2020 .....	76
III.18 Total PAGU dan Refokushing .....	77

## Daftar Chart

I.1	SDM Dinas Perhubungan.....	4
I.2	Jabatan Dinas Perhubungan .....	4
I.3	Kualifikasi Pendidikan .....	5
I.4	Kepangkatan Dinas Perhubungan.....	5
III.1	Lakalantas Tahun 2017-2021 .....	17
III.2	Korban dan Kerugian Materiil Lakalantas.....	18
III.3	Fatalitas Kecelakaan.....	19
III.4	Fatalitas dari korban jiwa.....	20
III.5	Sapras Perhubungan dalam Kondisi Baik.....	23
III.6	Sapras dan Kelengkapan Perhubungan .....	24
III.7	Sapras dan Kelengkapan Perhubungan .....	25
III.8	Persentase Titik Rawan Kecelakaan Tertib Aman.....	31
III.9	Titik Rawan Kecelakaan Tertib Aman .....	32
III.10	Pengaturan Pengamanan Lalu Lintas.....	35
III.11	Ketertiban Titik Lokasi Parkir .....	40
III.12	Angkutan Umum sesuai Standar Keselamatan.....	46
III.13	Persentase Kendaraan Uji KIR.....	47
III.14	Jumlah Kendaraan Uji KIR .....	49
III.15	Layanan Angkutan Darat Tahun.....	52
III.16	Nilai Konversi IKM .....	65





# BAB 1

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good governance*), dimana akan terlihat proses manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk maksud tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan per undang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 80 );
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 29 Juli 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024;
9. Peraturan Bupati Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;

11. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 18 tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.

### **C. Maksud**

1. Sebagai salah satu bahan ukuran akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021;
2. Sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

### **D. Tujuan**

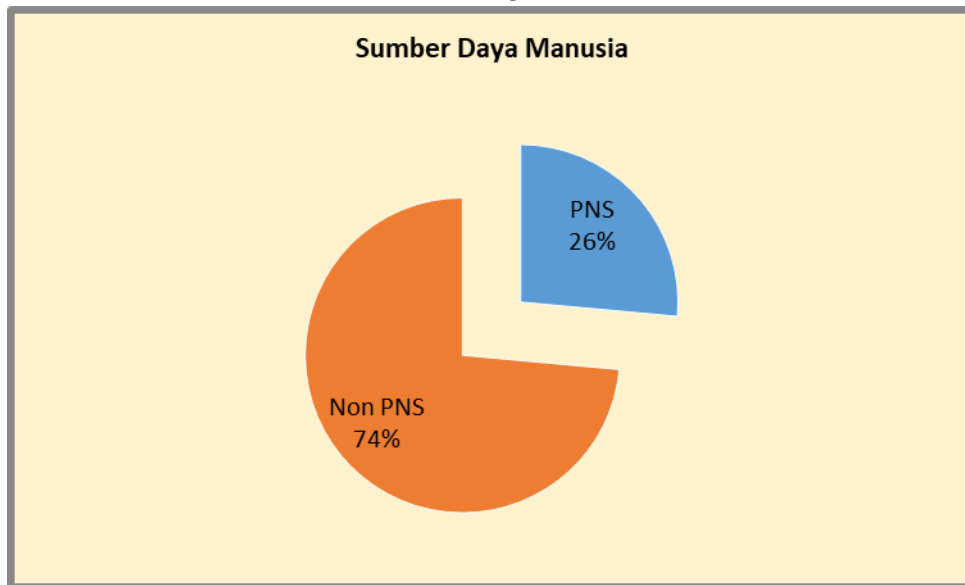
1. Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;
2. Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dalam mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;
3. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;
5. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
6. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/penataan organisasi kepegawaian dan tatalaksana serta pengendalian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

## E. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Perhubungan didukung sumber daya manusia sebanyak 31 (tiga puluh dua orang) dengan rincian 19 orang pejabat eselon dan 12 jabatan fungsional umum.

Chart I.1

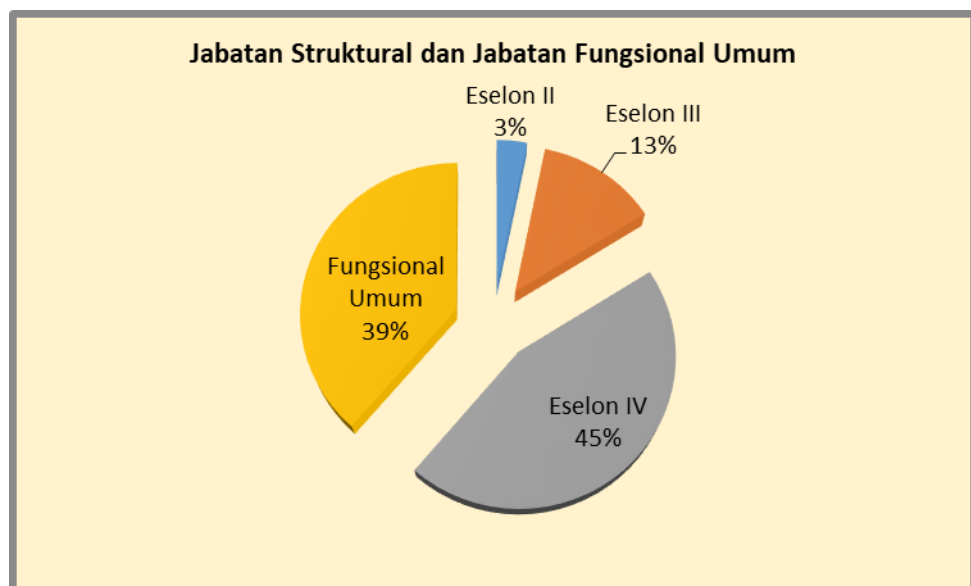
SDM Dinas Perhubungan Tahun 2021



Pejabat Struktural 20 orang dengan perincian: Eselon II : 1 orang, Eselon III : 4 orang, dan Eselon IV : 14 orang. Sementara Pejabat Fungsional : - orang, Fungsional umum : 12 orang, sedangkan Non-PNS : 89 orang.

Chart I.2

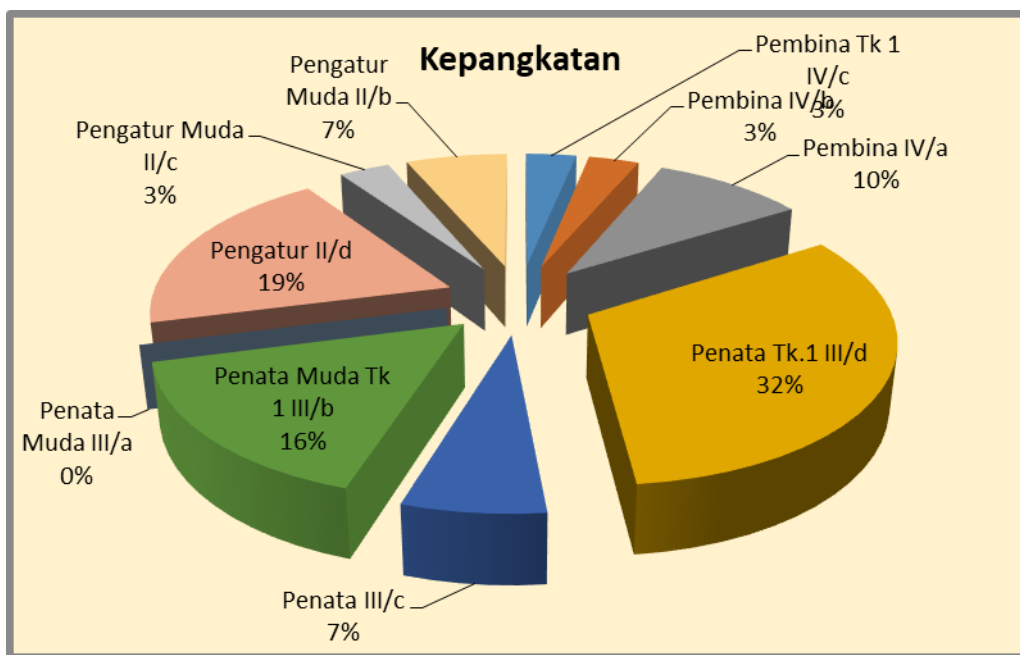
Jabatan Dinas Perhubungan Tahun 2021



Untuk kepangkatan, Golongan IV/c : 1 orang, IV/b : 1 orang, IV/a : 2 orang, III/d : 6 orang, III/c : 5 orang, III/b : 7 orang, III/a : 2 orang, II/d : 5 orang, II/c : 3 orang dan II/b : 1 orang serta II/a : 1 orang.

Chart I.3

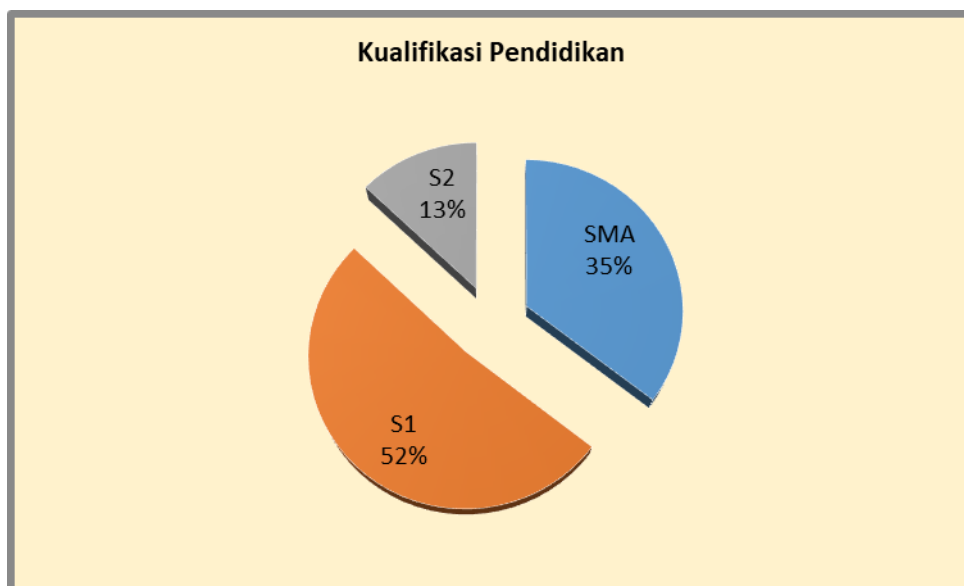
Kepangkatan Dinas Perhubungan Tahun 2021



Kualifikasi Pendidikan : S2 : 4 orang, S1 : 16 orang, D3 : 0 orang, SMA : 11 orang, SMP/SD : - orang.

Chart I.4

Kualifikasi Pendidikan Dinas Perhubungan Tahun 2021



Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Adapun susunan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

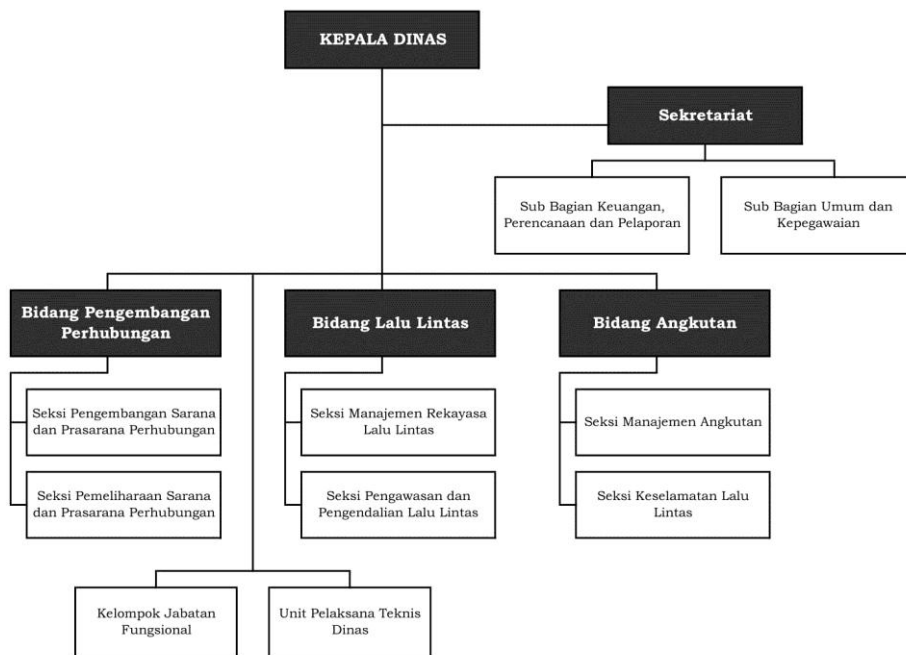
- 1) Kepala Dinas Perhubungan.
- 2) Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
- 3) Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan
  - a. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan
  - b. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan
- 4) Kepala Bidang Lalu Lintas
  - a. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
  - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas
- 5) Kepala Bidang Angkutan
  - a. Kepala Seksi Manajemen Angkutan
  - b. Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
  - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
  - b. UPTD Terminal
  - c. UPTD Perparkiran
  - d. UPTD Kepelabuhanan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan satuan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Januari 2019  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MADAR**

## F. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Rumusan isu strategis berikut berdasarkan rumusan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024, Berikut rumusan isu strategis terkait urusan perhubungan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024 :

1. Angka kecelakaan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas
2. Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan terkait keselamatan jalan dan konektivitas;
3. Rencana pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Polewali Mandar, akan menempatkan Polewali Mandar pada posisi strategis diantara daerah lain dan isu pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur;
4. Optimalisasi fungsi dan status Pelabuhan Tanjung Silopo;
5. Bekembangannya bisnis transportasi dan meningkatnya pemanfaatan kendaraan pribadi;
6. Standar keselamatan angkutan dan angkutan umum berplat Hitam
7. Penurunan minat pemanfaatan angkutan umum dan ketidakjelasan trayek angkutan umum
8. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan;
9. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang.



Diantara rumusan strategis berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024, terdapat beberapa isu dominan selama tahun 2021 diantaranya :

1. Vaksinasi Covid-19;
2. Kecelakaan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas;
3. Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan terkait keselamatan jalan dan konektivitas;
4. Rencana pembangunan Bandara : kesiapan dokumen perencanaan;
5. Standar keselamatan angkutan terkait peran dan fungsi pengujian kendaraan bermotor;
6. Operasionalisasi angkutan umum dan Trayek
7. Pengelolaan Parkir dan pengesahan Parkir berlangganan

## **G. Sitematika Penyajian**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); landasan hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penyajian.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang Perencanaan Strategis; dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.



# **BAB II**

## **Perencanaan Kinerja**

### **A. Rencana Strategis**

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga periode kepemimpinan daerah Kabupaten Polewali Mandar. Meskipun begitu terdapat hal penting yakni pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2021 sudah melandai sehingga perencanaan kinerja urusan perhubungan dapat dilakukan dalam upaya menjaga konsistensi pada rencana strategis organisasi perangkat daerah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Strategik yang disusun oleh Instansi Pemerintah harus mencakup uraian tentang visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

**Tabel II.1**  
Korelasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja  
Dinas Perhubungan Tahun 2021

<b>VISI</b>			
<b>POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA</b>			
<b>MISI</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius	Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah	Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern

<b>MISI</b>			
<b>3</b>			
<b>Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan</b>			
TUJUAN 1	TUJUAN 2		
Meningkatkan Kinerja Transportasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
Sasaran Strategis	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Pada tabel berikut akan diurai secara spesifik tujuan, sasaran dan indikator urusan teknis perhubungan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 yang menjadi acuan dan ukuran kerja.

**Tabel II.2**  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kinerja Transportasi Daerah	Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah	Angka kecelakaan lalu lintas	233 kejadian	220 kejadian	200 kejadian	170 kejadian	150 kejadian	120 kejadian	100 kejadian
			Persentase kualitas sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	88,66%	88,81%	90,11%	91,19%	92,04%	96,55%	96,88%
			Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman	55,00%	58,33%	60,00%	61,67%	63,33%	65,00%	66,67%
			Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan	44,88%	47,34%	49,01%	51,31%	52,32%	54,45%	55,78%
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	C	B	BB	A	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## B. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, mengacu kepada Rencana Strategis, alokasi anggaran dan kemampuan sumber daya lainnya.

**Tabel II.3**  
Perjanjian Kinerja Dishub Tahun 2021

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
				2021
1	Meningkatkan Kinerja Sistem Transportasi Daerah	Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah	Angka kecelakaan lalu lintas	170 kejadian
			Persentase kualitas sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	90.11%
			Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman	61.67%
			Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan	51.31%
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP



## **BAB III**

# **Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

### **A. Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 dan juga berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.

Dari dokumen tersebut, terdapat dua (2) tujuan, empat (4) sasaran dengan empat (4) indikator. Sedangkan yang menjadi fokus dalam LAKIP Tahun 2021 berfokus pada sasaran meningkatnya kinerja transportasi daerah dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas.

Dari itu, terdapat tiga (3) indikator program yang menjadi fokus capaian laporan ini, pertama persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik, persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman dan persentase angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan. Dari masing-masing indikator terdapat korelasi dan berfokus pada tiga hal, pertama sarana prasarana perhubungan, kedua ketertiban dan keamanan lalu lintas pada titik rawan kecelakaan dan yang ketiga terkait standar keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

Dalam pemaparan ini akan dijabarkan secara komprehensif turunan dari indikator program sampai pada level indikator kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Analisis dan evaluasi juga dilakukan untuk menghitung target capaian dan realisasi setiap indikator kinerja dengan tentu mengungkap kendala dan solusi masing-masing.

## Pengukuran Kinerja, Skala Predikat dan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menganalisis tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target dari masing-masing indikator terkait. Rumus untuk menghitung capaian kinerja indikator terdapat dua macam :

1. Indikator bermakna positif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya, semakin kecil realisasi semakin buruk kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya kinerjanya, atau sebaliknya, semakin kecil realisasi semakin baik kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100\%$$

Dalam laporan ini, indikator negatif digunakan untuk mengukur kinerja sasaran meningkatnya kinerja transportasi daerah dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

95% s.d <100%	Sangat Berhasil
80% s.d 95%	Berhasil
50% s.d <80%	Cukup Berhasil
0% s.d <50%	Tidak Berhasil

**Tabel III.1**  
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah	Angka kecelakaan lalu lintas	102.00%	Sangat Berhasil
		Persentase kualitas sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	99.76%	Sangat Berhasil
		Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman	102.19%	Sangat Berhasil
		Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan	124.22%	Sangat Berhasil
		Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik	Baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP



# **SASARAN 1**

**Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah**

Indikator

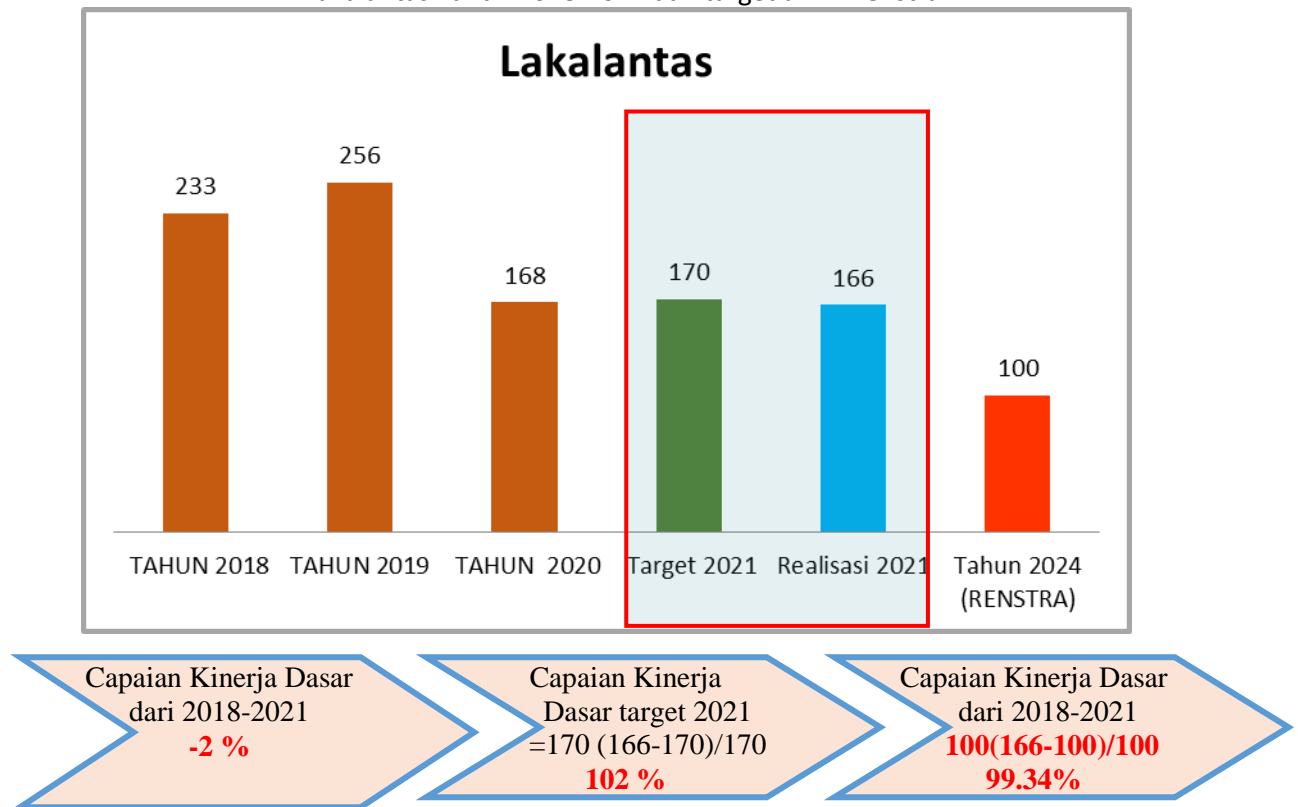
**Angka Kecelakaan Lalu Lintas**

Target

**170 Kejadian**



**Chart III.1**  
Lakalantas Tahun 2018-2021 dan target akhir Renstra



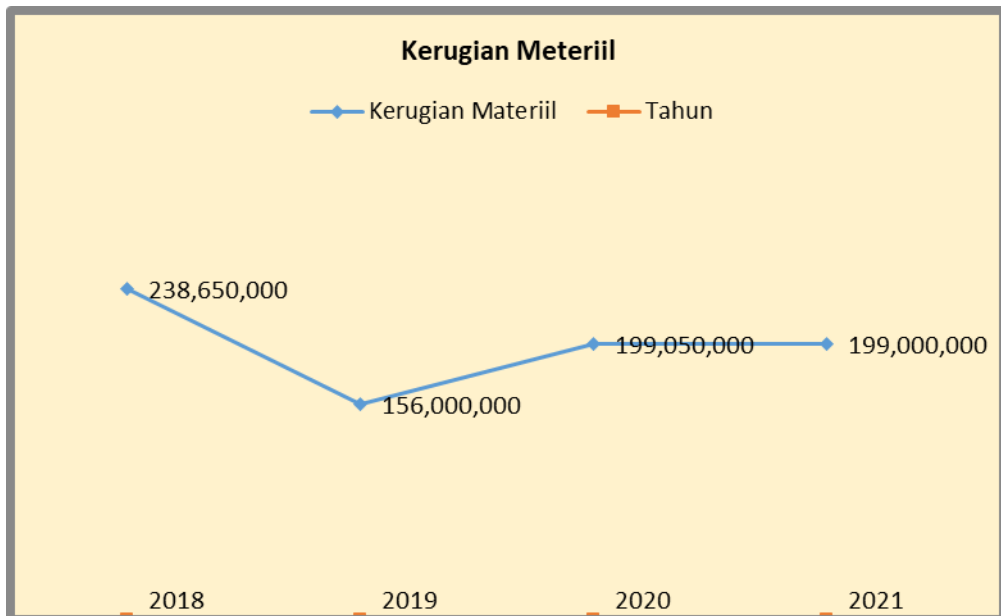
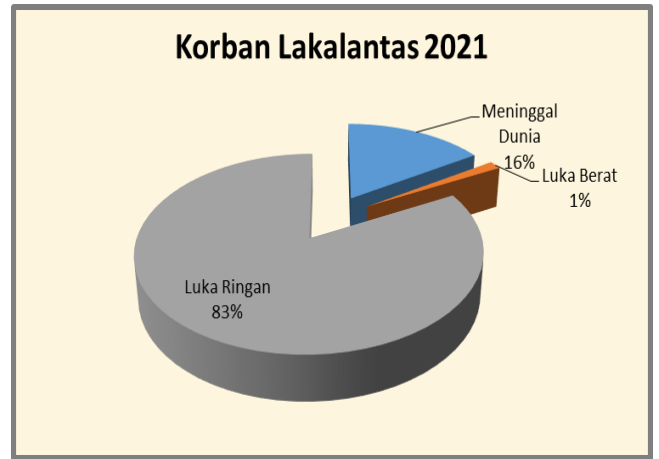
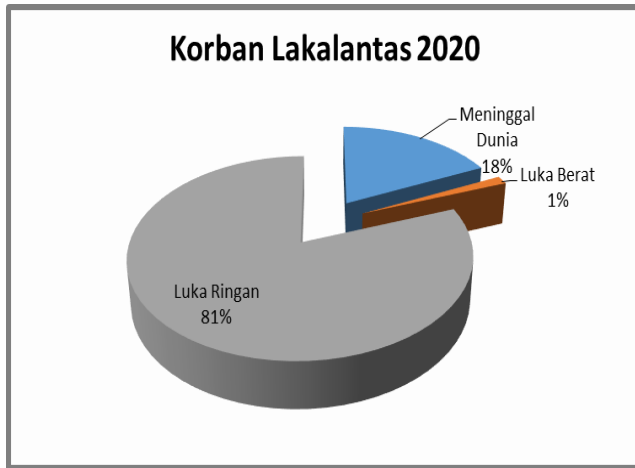
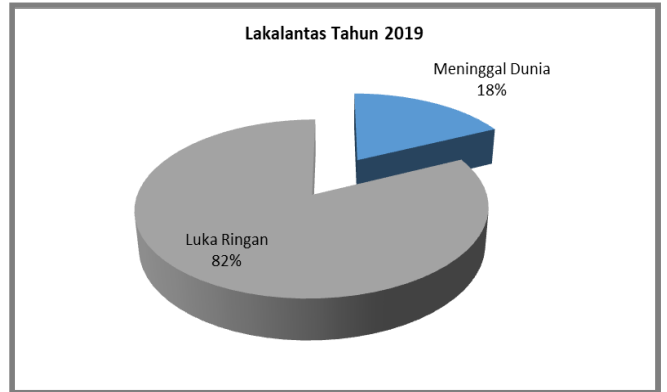
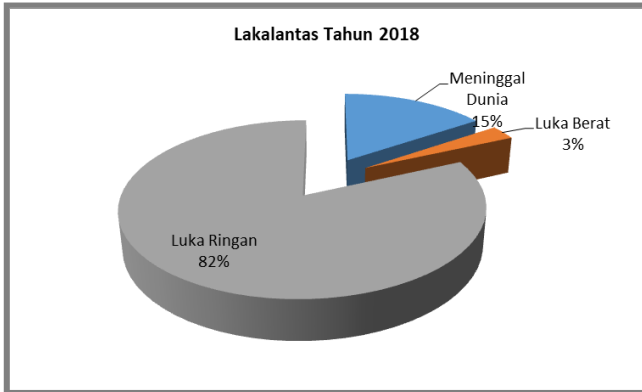
Dengan hitungan indikator negatif, capaian kinerja tahun 2021 untuk menekan angka Lakalantas mencapai 102%. Capaian kinerja dasar tahun 2018-2021 berangkat dari angka -2%. Kemudian, bila disandingkan dengan target akhir Renstra yakni 100 kejadian Lakalantas, maka kinerja tahun 2021 mencapai 99,34%. Berdasarkan chart tersebut juga tergambar, bahwa angka Lakalantas Tahun 2021 mengalami penurunan 15% kejadian dari tahun 2020.

Dari sisi target kinerja terlampaui. Hal ini disebabkan selama tahun 2021 mobilitas kendaraan selama pandemi Covid-19 yang berkurang. Meskipun, Lakalantas tetaplah merupakan kejadian insidental yang merugikan. Kelalaian manusia, kondisi jalan dan kendaraan merupakan faktor dominan Lakalantas. Namun, keberadaan fasilitas keselamatan jalan, rambu-rambu lalu lintas dan juga penerapan standar keselamatan jalan angkutan serta pengaturan pengamanan lalu lintas juga di antara upaya yang dilakukan dalam menekan laju Lakalantas di Kabupaten Polewali Mandar.

**Chart III.2**

**Korban dan Kerugian Materiil Lakalantas Tahun 2018-2021**

Sumber : Polres Polman



Lakalantas di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, mencapai 233 kejadian dengan 62 korban meninggal dunia, 11 orang luka berat dan 326 luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 238.650.000. Tahun 2019, sebanyak 256 kejadian dengan 60 korban meninggal dunia, 0 orang luka berat dan 275 luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 156.000.000.

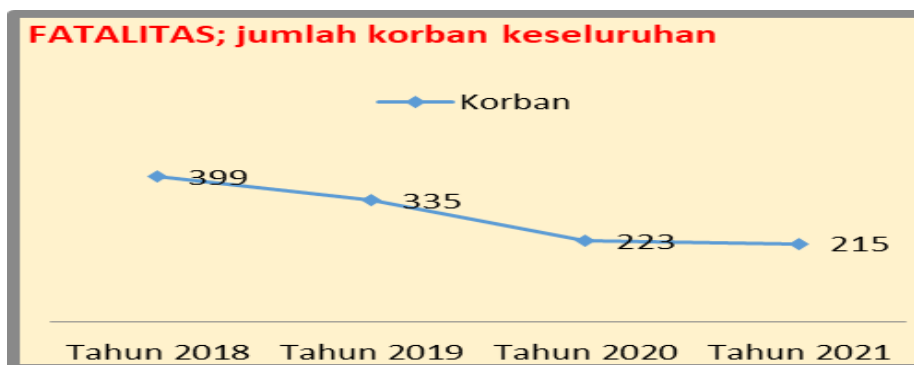
Sedangkan tahun 2020, jumlah kejadian mencapai 168 dengan 40 korban meninggal dunia dan 180 luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 195.050.000. Tahun 2021, Lakalantas 166 kejadian dengan 34 korban meninggal dunia, 3 luka berat dan 178 orang luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 170.600.000.

Dari data di atas bisa dicermati, jumlah korban dan kerugian materiil sangat fluktuatif, meskipun dari sisi kejadian tahun 2021 mengalami penurunan yang dari 168 kejadian pada tahun 2020 menjadi 166 kejadian pada tahun 2021 atau penurunan mencapai 15%. Pandemi masih Covid-19 merupakan faktor utama menurunnya mobilitas kendaraan yang berimplikasi pada penurunan Lakalantas pada tahun 2021.

Dari sisi fatalitas kejadian juga terjadi penurunan. Tahun 2020 dan 2021 terdapat penurunan jumlah korban meninggal dunia ataupun luka berat, dari 223 korban pada tahun 2020 menurun menjadi 215 korban jiwa atau penurunan sampai pada angka 33,43%. Dari tingkat fatalitas korban, dari sisi korban meninggal dan luka berat, juga terjadi penurunan 17,81% dari tahun 2018 ke 2019, sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 menurun sebanyak 28,33%.

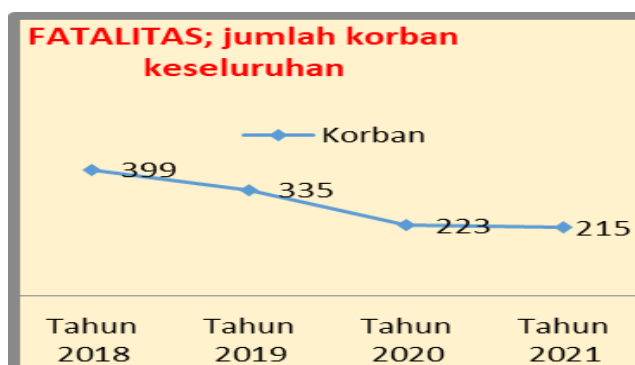
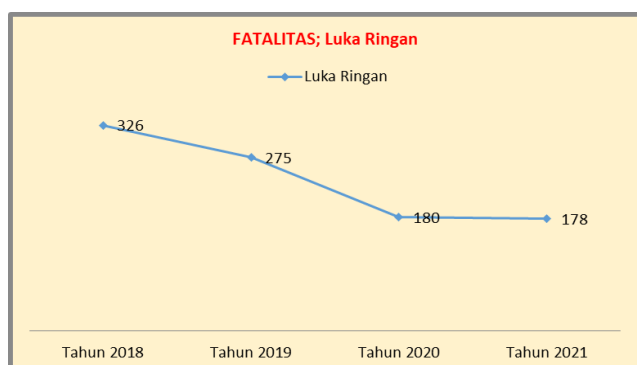
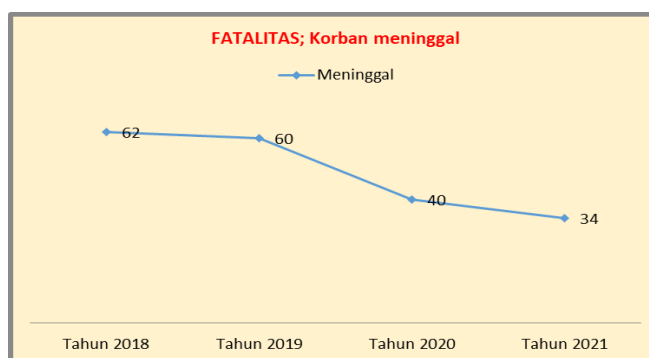
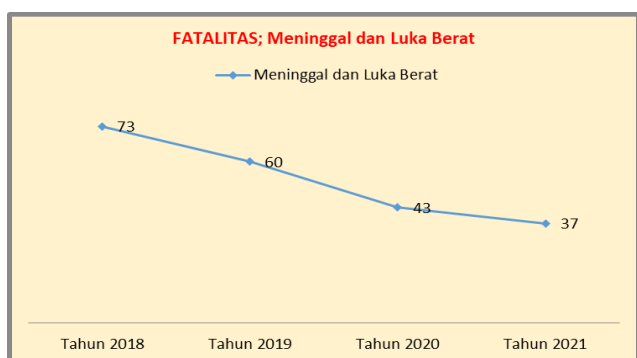
Secara keseluruhan korban, tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan dari 223 korban menjadi 215 korban atau mencapai 33,43%. Untuk korban meninggal dunia terjadi penurunan dari di tahun 2020 sebanyak 43 orang dan pada tahun 2021 menjadi 37 orang atau 16%. Luka berat pada tahun 2021 sebanyak 3 orang dan luka ringan 178 orang.

**Chart III.3**  
Fatalitas Lakalantas Tahun 2018-2021



Korban meninggal dunia terjadi fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Terjadi penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019, dan pada tahun 2019 ke tahun 2020 juga mengalami penurunan, sedangkan pada 2021 terjadi penurunan 33,43%. Untuk korban meninggal dan luka berat mengalami penurunan 17,81% pada 2018, dan , pada tahun 2020 mengalami penurunan 28,33% pada 2020. Sedangkan luka ringan, terjadi kenaikan dan penurunan 3,23% dalam kurun waktu 2018-2021. Sedangkan pada tahun 2021 mngalami penurunan drastis mencapai 99,46%.

**Chart III.4**  
Fatalitas Lakalantas dari sisi korban jiwa  
Tahun 2018-2021



# Lakalantas 2021



**Target 170 kejadian**

**Realisasi 166 kejadian**

**Penurunan 15%**

**Kinerja 102%**





1

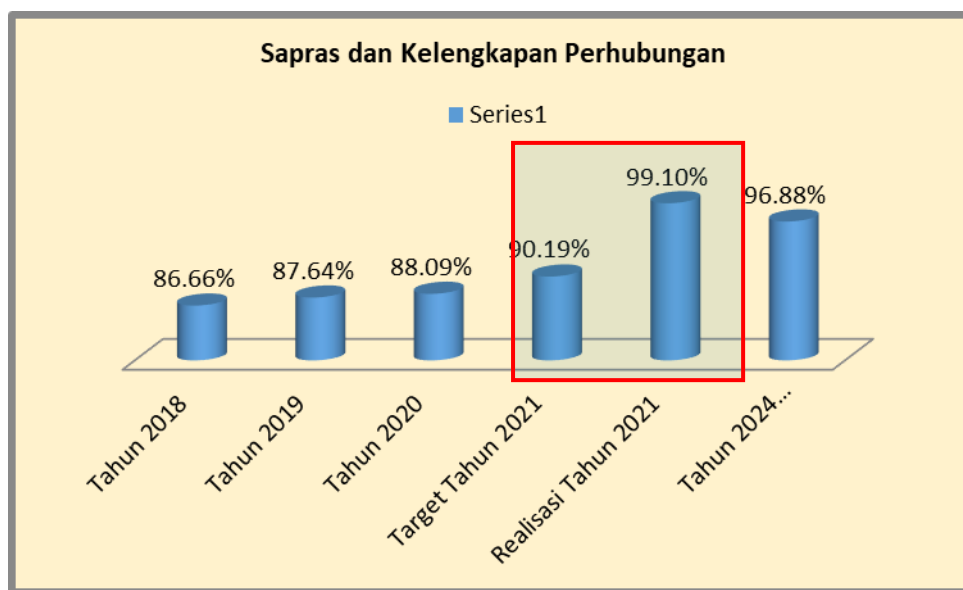
## Indikator Program

**Persentase Sarana Prasarana Perhubungan  
dalam Kondisi Baik**

Target  
**90,19%**

Persentase sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja dari tahun 2017-2019 meningkat 3,37%, meskipun pada tahun 2019 belum sesuai target. Target kinerja 88,81% dan realisasi 87,64%, dalam artian capaian kinerja mencapai 98,68%. Capaian tahun 2019, bila disandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 90,46%. Hal ini tergambar dalam chart berikut ini :

**Chart III.5**  
Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik  
Tahun 2018-2021 dan target akhir Renstra

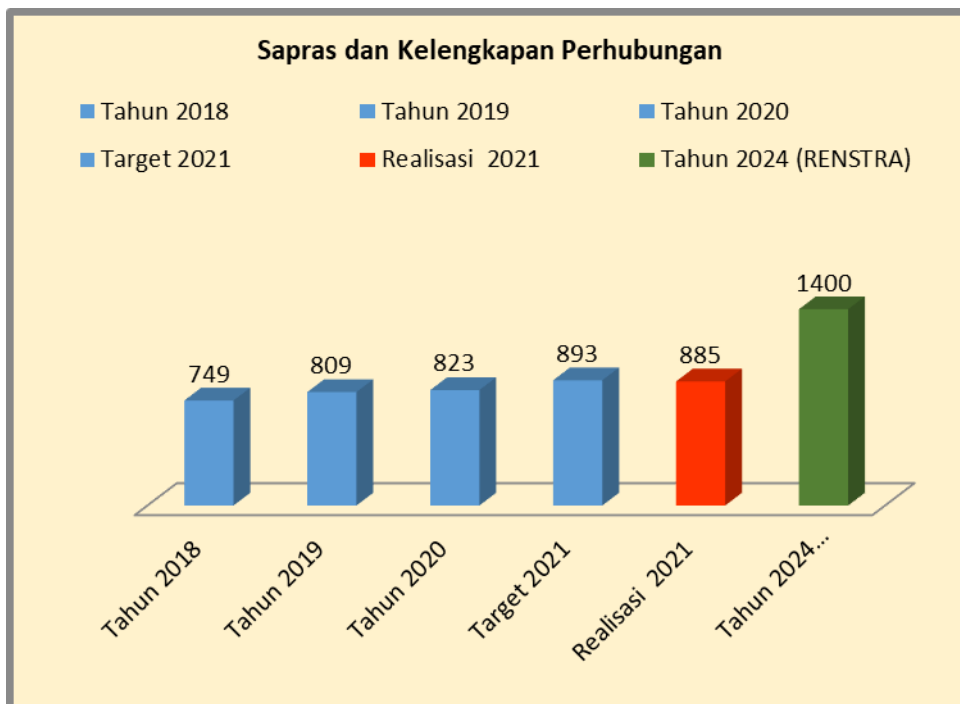


Capaian antara target dan realisasi pada tahun 2021 mengalami kenaikan persentase dari tahun 2020 di tahun 2021 pengadaan sarana dan prasarana mencapai 99,10 % dari target 70 terealisasi 64 tidak tercapainya target di sebabkan pada pengadaaan papan nama jalan dari target 40 menjadi 32 ini di sebabkan karna adanya kenaikan harga bahan.

## 1. Indikator : Jumlah Sarana Prasarana dan Kelengkapan Perhubungan

Indikator jumlah sarana prasarana merupakan indikator dari kegiatan Pembangunan dan Pengadaan sarana prasarana perhubungan. Tahun 2021, sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan target berdasarkan Renstra yakni 893 unit, realisasi 887 unit, dalam artian capaian kinerja 99,33%. Jumlah ini naik dari tahun 2020 yang berjumlah 823 unit.

**Chart III.6**  
Sapas dan Kelengkapan Perhubungan Tahun 2018-2021

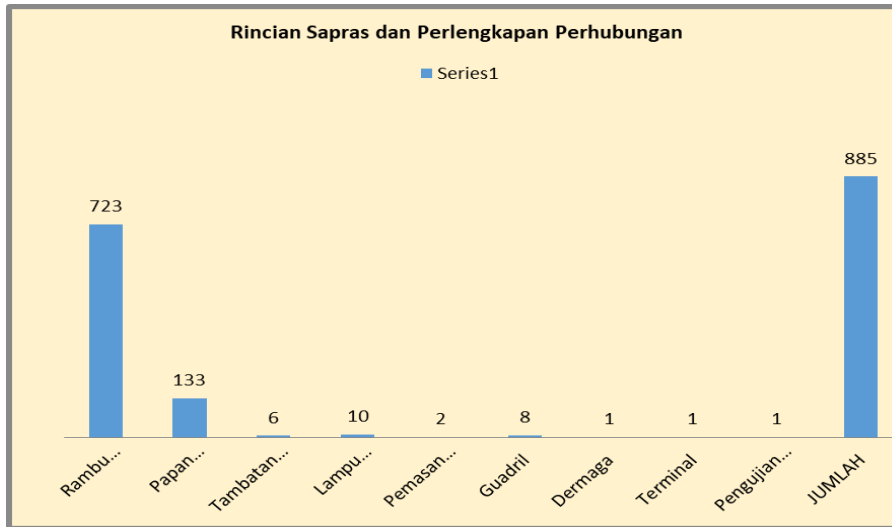


CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2021  
**=885/893**  
**99,10**

Sarana prasarana perhubungan terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, papan nama jalan, Terminal Tipe C Wonomulyo, Pengujian Kendaraan Bermotor, Tambatan Perahu serta Dermaga Rakyat dan pada tahun 2021 pengadaan lampu jalan menjadi kewenangan dinas perhubungan yang sebelumnya pada bagian umum sekretariat daerah.



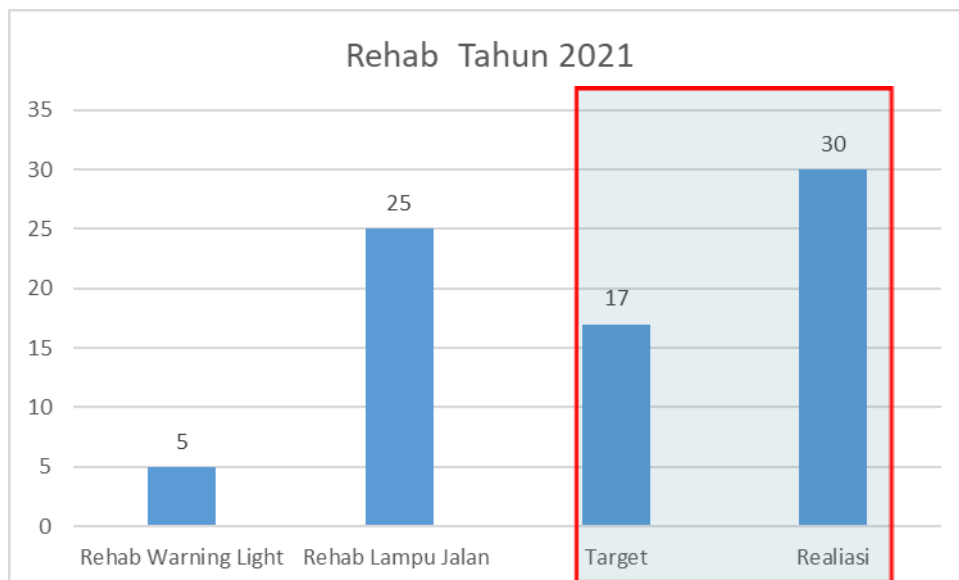
**Chart III.7**  
Sapras dan Kelengkapan Perhubungan Tahun 2021



## 2. Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang diperbaiki

Jumlah sarana prasarana perhubungan yang diperbaiki merupakan indikator dari kegiatan Rehab/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan. Sarana prasarana perhubungan yang diperbaiki pada tahun 2021 berupa Warning light 5. Dari target 5 unit dan rehab lampu jalan dari 15 realisasi 25 unit, maka capaian kinerja sebesar 176%.

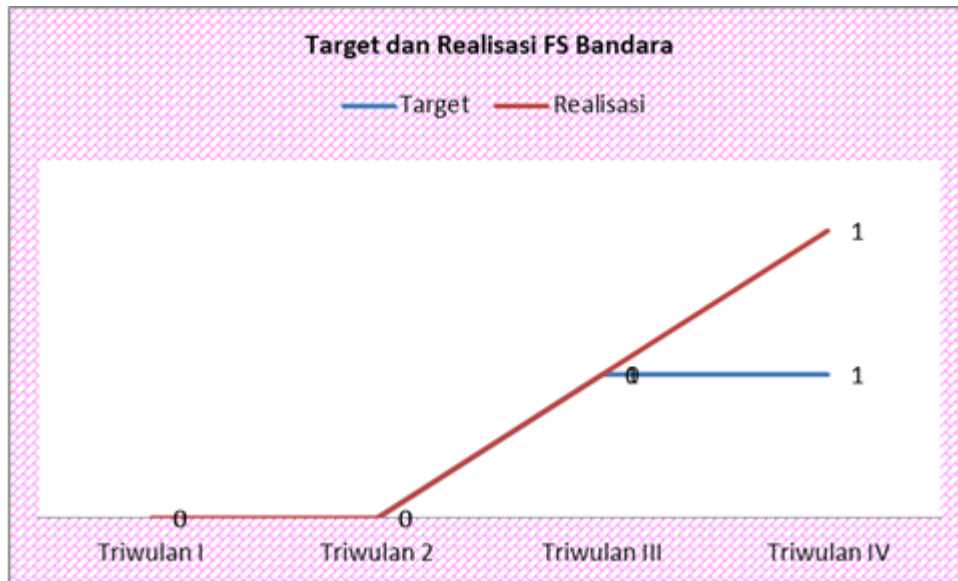
**Chart III.7**  
Rehab tahun 2021



## 3. Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Paket dokumen pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan adalah dokumen Feasibility studi (FS/studi kelayakan), realisasi 1 paket dokumen pada triwulan IV.

**Gambar III.14**



Pelaksanaan kegiatan ini rencana realisasi 100% di triwulan III, namun terdapat kendala komunikasi dengan pihak ke-3 pelaksana kegiatan, sehingga terealisasi pada triwulan IV.



*Bupati Polewali Mandar  
Bersama Kadishub  
dan pihak ketiga  
saat ekspose FS Bandara  
di Polewali Mandar*



FS ini merupakan bagian dari *commitmen will* dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mewujudkan keberadaan Bandara di Polewali Mandar. Dokumen ini merupakan dokumen wajib yang harus dipenuhi untuk pembangunan sebuah Bandara. FS merupakan dokumen awal

dari dokumen yang lain seperti Dokumen Amdal, Andalalin dan Masterplan serta DED Bandara.

Proses pengerjaan dokumen SF Bandara dilakukan dalam 3 tahap ekspose; pertama ekspose laporan pendahuluan, laporan antara kemudian laporan akhir. Pelibatan berbagai stakeholder; unsur masyarakat dan berbagai instansi saat ekspose merupakan upaya mempertemukan persepsi dan penyempurnaan data.

Dari hasil kajian dokumen ada 5 lokasi yang menjadi alternatif Desa Paku Kecamatan Binuang, Desa Patampanua Kecamatan matakali, Desa Tandung Kecamatan Tinambung, Desa Tumpiling Kecamatan Wonomulyo dan desa Lampoko Kecamatan Campalagian dari kelima alternative lokasi tersebut Desa Patampanua Kecamatan Matakali merupakan calon lokasi paling strategis pembangunan Bandara di Polewali Mandar, diantara Desa Galeso Wonomulyo, Desa Sumarrang Campalagian dan Desa Tandung Tinambung.

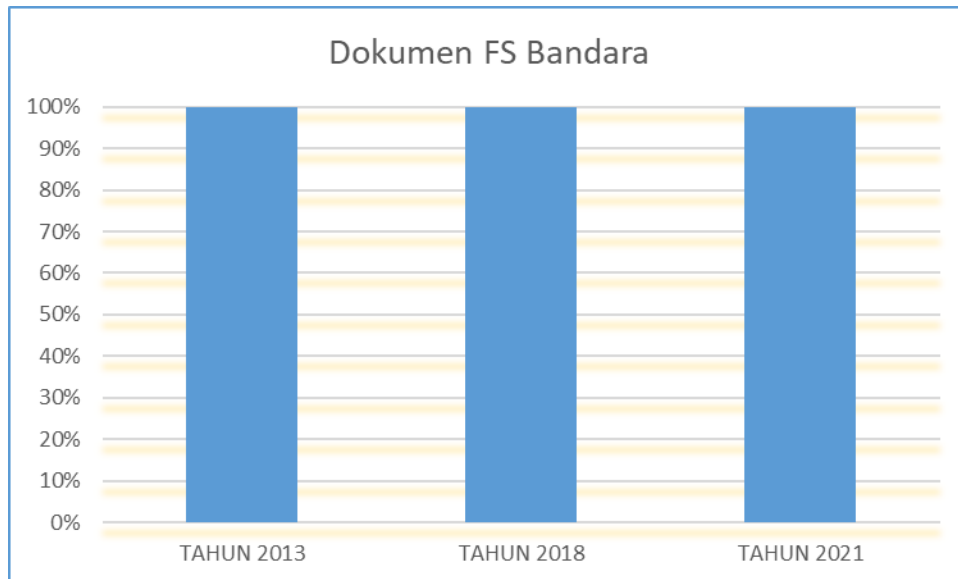


**ALTERNATIF LOKASI 2 :  
DESA PANTAMPANUA, KECAMATAN MATAKALI**

R-11: 119° 17' 26,513" BT; 3° 24' 33,765" LS  
R-29: 119° 16' 36,892" BT; 3° 24' 16,050" LS

Proses pengerjaan dokumen FS Bandara ini melalui tiga tahap yakni, laporan awal, laporan antara dan laporan akhir. Intisari dari Dokumen ini adalah mengukur kelayakan pembangunan Bandara di Polewali Mandar. FS Bandara ini merupakan dokumen ketiga, setelah pada 2013 dan tahun 2018 juga pernah dilakukan kajian serupa di Polewali Mandar.

Gambar III.15



**Analisis Kegiatan;** Kegiatan ini merupakan kegiatan awal dari dokumen pembangunan Bandara. Pelaksanaan dari waktu yang direncanakan cukup molor, karena terdapat perubahan pelaksana kegiatan yakni pihak ke-3. Hal tersebut dikarenakan ketidaksiapan administrasi calon pelaksana kegiatan. Meskipun akhirnya ada pelaksana lain dan dapat menyelesaikan kegiatan pada tahun anggaran.

Kegiatan yang sangat membantu kegiatan ini adalah ketersediaan data yang lengkap dan valid serta intensitas komunikasi, baik itu dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar maupun dengan Kementerian Perhubungan RI.

**Kendala;** Ketergantungan pada pihak ke-3 yang berada di luar daerah. Solusi yang dilakukan dengan tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI untuk bergerak cepat menjalin komunikasi dengan penyelenggara kegiatan yang lain.

Kegiatan	Output	Anggaran	Penanggung Jawab
Perencanaan pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan	1 Paket Dokumen FS Bandara	Rp. 915.718.800,-	Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pada Kegiatan ini terlaksana relisasi kegiatan 100 %, dan realiasi anggaran 100%

## Sumber daya, Kendala dan Solusi

### Indikator Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan terkait pemenuhan indikator sarana prasarana dalam kondisi baik dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana terpapar dari tabel berikut :

**Tabel III.2**  
Program Kegiatan dan serta Realisasi Anggaran  
Indikator Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik Tahun 2021

	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWA	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalur	1,380,935,424	1,380,935,424	1,380,835,424	99.99
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	915,718,800	915,718,800	915,718,800	100.00
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	915,718,800	915,718,800	915,718,800	100.00
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	465,216,624	465,216,624	465,116,624	99.98
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	261,139,924	261,039,924	261,039,924	99.96
	Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan	204,076,700	204,076,700	204,076,700	100.00

### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari target kinerja sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik sebesar 90,11% dan terealisasi 99,11% dalam artian kinerja mencapai 97,76%. Seiring dengan melandainya pandemi covid 19 aktifitas kinerja menunjukkan tren peningkatan total realisasi anggaran 1.380.935.424 terealisasi 99.99 %

Kendala dan solusi terkait pemenuhan indikator sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebagai berikut :

#### KENDALA

- Vaksinasi Covid 19

- Kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan terkait keselamatan jalan yang tidak sebanding dengan alokasi anggaran;
- Kewenangan penanganan terkait status jalan;
- Minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan;
- Pemanfaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan masih minim;
- Belum tersedianya masterplan transportasi;
- Belum terwujudnya pembangunan Bandara;



### SOLUSI

- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dishub Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Perhubungan RI terkait pemenuhan sarana prasarana keselamatan jalan;
- Melakukan sosialisasi dan juga melakukan pemeliharaan sapsras dan perlengkapan perhubungan;
- Berupaya meningkatkan pemanfaatan terminal dan pengujian kendaraan;
- Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan sapsras perhubungan;
- Intensitas komunikasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait pembangunan Bandara.

## Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik



**Target 90,11%**

**Realisasi 87,74%**

**Kinerja 97,76%**







2

## **Indikator Program**

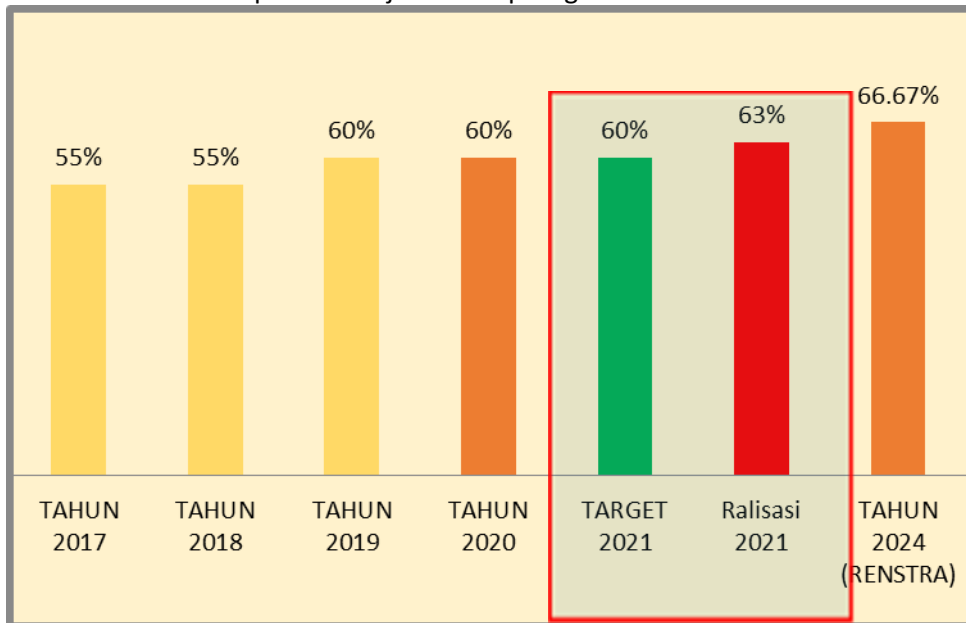
**Persentase Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman**

Target  
**60%**

Pada Tahun 2021, persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman, target kinerja 60% dan realisasi 63%. Dalam artian capaian kinerja mencapai 105%. Capaian kinerja dasar dari 2017-2021 mencapai 87%. Bila capaian pada tahun 2021 ini disandingkan dengan target akhir Renstra, maka capaian sudah mencapai 94%.

**Chart III.8**

Persentase Titik Rawan Kecelakaan Tertib dan Aman, Tahun 2017-2021 dan capaian kinerja terhadap target akhir Renstra



Jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar yakni 60 titik. Diantara itu pada tahun 2020 terdapat 28 titik tertib aman dari target 36 titik. Angka ini turun dari tahun 2021 yang sudah 42 titik tertib dan aman dari 60 lokasi titik aman . Defenisi titik lokasi tertib dan aman adalah ketika titik rawan kecelakaan tersebut terpasang rambu-rambu lalu lintas dan atau dilakukan pengamanan oleh petugas lapangan Dinas Perhubungan.

**Chart III.9**

Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman, Tahun 2017-2021



**Tabel III.3**

Titik Lokasi Rawan Kecelakaan dan Kepadatan Lalu Lintas Tahun 2021

NO	TITIK LOKASI	Tahun 2021	Ket.
		70.00%	
1	Sappoang Binuang	1	Rambu
2	Kanang Binuang	1	Rambu
3	Pintu Gerbang Polewali	1	Rambu
4	Tonyaman Binuang	-	-
5	Depan Terminal tipalayo	-	-
6	Pertigaan Salu Mandalan	-	-
7	Pertigaan Lemo	1	Rambu
8	Jl. Durian	1	Rambu
9	SDN 001 Polewali	1	PAM
10	SMPN 1 Polewali	1	PAM
11	SDN 026 Polewali	1	PAM
12	Pertigaan DPR	1	PAM
13	SMA 1 Polewali	1	PAM
14	TK Pertiwi	1	PAM
15	SDN 066 Polewali	1	PAM
16	SMPN 3	1	PAM
17	SDN 028	1	PAM
18	Sentral	1	PAM
19	Perempatan kantor bupati	1	PAM
20	Kejaksaan	1	PAM
21	SDN 17 manding	1	PAM
22	SDN 020 Rea barat	1	PAM
23	SMPN 1 Wonomulyo	1	PAM
24	Perempatan 4 terminal	1	PAM
25	Perempatan 4 jansen	1	PAM
26	SMPN 5 Wonomulyo	1	PAM
27	Pantai bahari	1	PAM
28	Sport Center	1	PAM
29	Lokasi keg. Insidentil	1	PAM
30	Jembatan Takatidung Perempatan Andi Latanratu-	1	Rambu
31	Perempatan Andi Latanratu-Sumur Manurung	-	-
32	Perempatan Andi Latanratu-Andi Tomming	-	-
33	Perempatan Andi Depu-Andi Tomming	-	-
34	Kampung Tangga Matakali/Mts	-	-
35	Labasang Matakali	1	Rambu
36	Pertigaan Lampa Mapilli	1	Rambu
37	Simpang tiga Jl. ke Tutar	-	-

38	Pertigaan Pasar Mapilli	1	Rambu
39	Jembatan Campalagian	1	Rambu
40	Pasar Campalagian	1	Rambu
41	Depan Masjid Lapeo	1	Rambu
42	Palippis Campalagian	1	Rambu
43	Pasar Pambusuang	1	Rambu
44	Simpang empat Lamasariang	-	-
45	Simpang tiga samping SMA	1	Rambu
46	Dekat Patung Andi Depu	-	-
47	Simpang empat Depan Masjid	1	Rambu
48	Simpang tiga Pintu Gerbang Kris	-	-
49	Simpang tiga eks Pasar Ikan	1	Rambu
50	Simpang Tiga Depan Madrasah	1	Rambu
51	Simpang tiga jalan Korban 40.000	-	
52	Simpang empat Jl. Basseang	-	-
53	Samping Polres Polman	1	Rambu
54	Simpang empat dekat Telkom	1	Rambu
55	Simpang tiga jl. GI PLN	1	Rambu
56	Poros Mamasa Simpang tiga	-	-
57	Simpang tiga kantor kec. Anreapi	-	-
58	Simpang tiga Papandangan	-	-
59	Simpang tiga jl. Kunyi	-	-
60	Poros Mamasa Leppan Anreapi	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>	

Pada tahun 2021, disamping kegiatan rutin pengaturan pengamanan lalu lintas, Kegiatan survei titik rawan kecelakaan juga intens dilakukan. Kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder, Polres Polewali Mandar dan PU PR atau Jasa Marga. Hal ini dilakukan untuk menemukenali lokasi rawan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Hasil survei akan menjadi rekomendasi tentang keselamatan lalu lintas bagi pihak-pihak terkait.

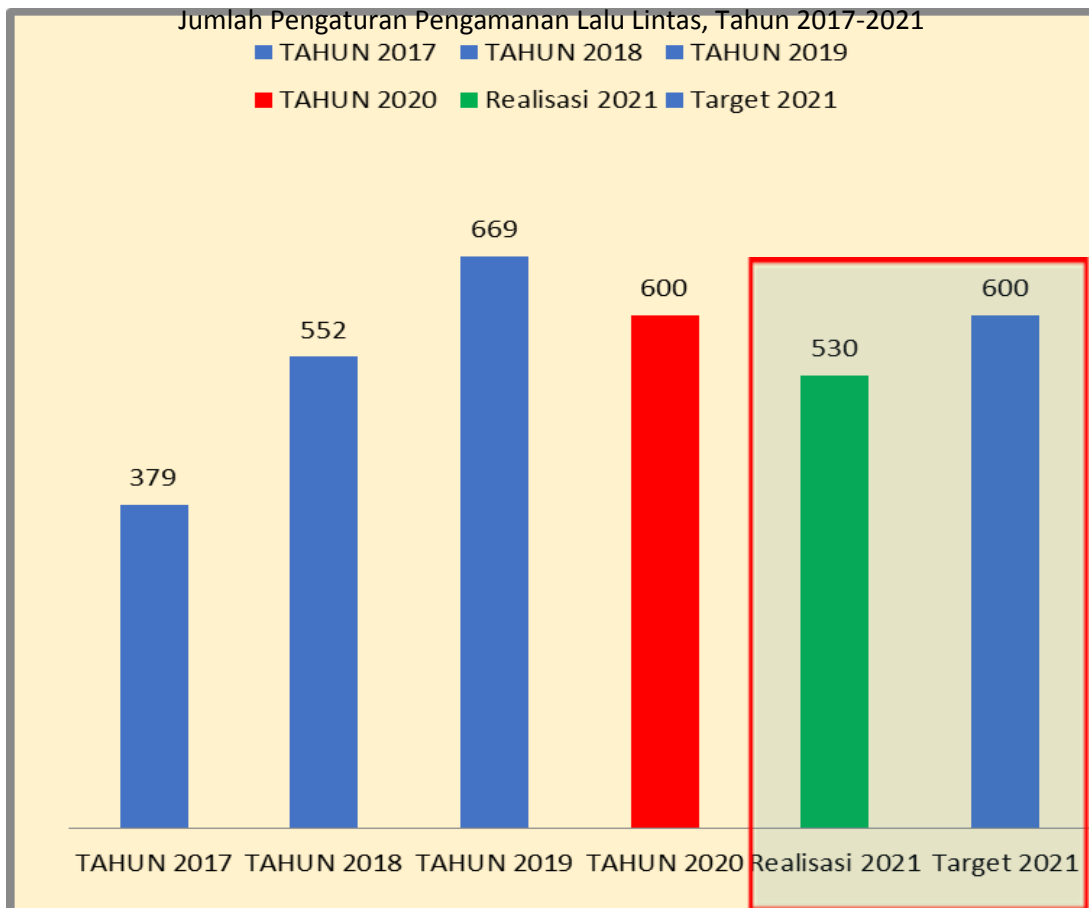


## 1. Indikator : Jumlah lokasi tertib lalu lintas

Indikator ini ditopang oleh kegiatan Pengaturan dan pengamanan lalu lintas. Pada tahun anggaran 2021, bentuk kegiatan dilakukan dengan pengaturan dan pengamanan titik lokasi rawan kepadatan dan kecelakaan lalu lintas pada 6 lokasi dari target 12 titik lokasi atau 50% lokasi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin harian, jadi aktivitas pengaturan pengamanan lalu lintas dilakukan dengan intensitas tinggi. Pada tahun 2021, kegiatan ini dilakukan sebanyak 530 kali dari target 600 kali atau kinerja mencapai 88%.

Chart III.10



Seiring dengan melandainya Covid-19 beberapa aktifitas pengaturan pengamanan lalu lintas dilakukan di beberapa lokasi seperti di pasar Sentral pasar Pasar pelitakan pasar Tinambung pasar Wonomulyo, Kegiatan pengamanan pengamanan juga di lakukan Bersama Polres polman melalui operasi terpadu

perayaan even yang berlokasi di Sport center yang biasa merupakan pusat even berbagai kegiatan,.

**Tabel III.4**  
Jumlah Kegiatan Pengaturan Pengamanan Lalu Lintas Tahun 2021

No	Bulan	Data Lalu Lintas 2021															Ket		
		Jumlah Kegiatan	1		2		3		4		5		6		7			8	
			Pengamanan Titik-Titik Kemacetan	Jumlah	Car Free Day	Jumlah	Pengamanan Pasar	Jumlah	Hari Besar	Jumlah	Insedentil	Jumlah	Event	Jumlah	Keagamaan	Jumlah		Pengawalan	Jumlah
1	Januari	48					-PAM Pasar Sentral	8			-PAM OPS Lilin Siamasei Posko Binuang,Polewali,Won omulyo,Campalagian, Tinambung, Tgl 01-04 Januari	4				-Pengawalan Mobilias Pengungsi	4		
							-PAM Pasar Campalagian	9			- PAM Posko Induk Pengungsi di Stadion tgl 22-28	7							
							-PAM Pasar Tinambun g	8											
							-PAM Pasar Pelitakan	8											
			JUMLAH	0	JUMLAH	0	JUMLAH	33	JUMLAH	0	JUMLAH	11	JUMLAH	0	JUMLAH	0	JUMLAH	4	
2	Februari	32					-PAM Pasar Sentral	7											
							-PAM Pasar Campalagian	9											
							-PAM Pasar Tinambun g	8											
							-PAM Pasar Pelitakan	8											
			JUMLAH	0	JUMLAH	0	JUMLAH	32	JUMLAH	0	JUMLAH	0	JUMLAH	0	JUMLAH	0	JUMLAH	0	
3	Maret	63					-PAM Pasar Sentral	9			-PAM Posko Terpadu Bersama Polres Polman tgl 5-31	27			-PAM Pembukaan & Penutupan STQ tgl 25 & 31	2			
							-PAM Pasar Campalagian	8			-PAM Alun-alun tgl 20	1							

						-PAM Pasar Tinambun g	8											
						-PAM Pasar Pelitakan	8											
			JUMLAH	0	0		33	0		28	0	2	0					
4	April	41				-PAM Pasar Sentral	9		-PAM Giat FEKDI Tgl/9	1								
						-PAM Pasar Campalagian	8											
						-PAM Pasar Tinambun g	8											
						-PAM Pasar Pelitakan	8											
						-PAM Pasar Wonomulyo	7											
			JUMLAH	0	0		40	0		1	0	0	0					
5	Mei	43				-PAM Pasar Sentral	7						-PAM OPS Ketup at Tgl 6 s/d 17	1	2			
						-PAM Pasar Campalagian	7											
						-PAM Pasar Tinambun g	6											
						-PAM Pasar Pelitakan	7											
						-PAM Pasar wono	4											
			JUMLAH	0	0		31	0		0	0	1	2	0				
6	Juni	42				-PAM Pasar Sentral	8											
						-PAM Pasar Campalagian	8											
						-PAM Pasar Tinambun g	9											
						-PAM Pasar Pelitakan	8											
						-PAM Pasar wono	5											
					-PAM Car Free Day	4												
			JUMLAH	0	4		38	0		0	0	0	0					
7	Juli	43				-PAM Pasar Sentral	8		-PAM Apel Senin Tgl 5,12	2								
						-PAM Pasar Campalagian	9		-PAM OPS Kir Tgl 13,14,15	3								
						-PAM Pasar Tinambun g	9											
						-PAM Pasar Pelitakan	4											
						-PAM Pasar wono	4											







Untuk lebih mengefektifkan pengaturan pengamanan lalu lintas, juga dalam beberapa momen tertentu dilakukan rekayasa lalu lintas. Hal ini biasa dilakukan dalam even-even besar tingkat kabupaten yang melibatkan keramaian dan penumpukan kendaraan.



Selain pengaturan pengamanan, juga dilakukan identifikasi titik-titik rawan kecelakaan yang aman dengan indikator terpasangnya rambu-rambu lalu lintas keselamatan jalan pada titik tersebut.

Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas dijadikan ukuran, karena tidak semua titik rawan kecelakaan bisa dijangkau dengan intensitas pengamanan personil lapangan, jadi dengan adanya rambu-rambu lalu lintas diharapkan dapat memberikan peringatan atau petunjuk kepada pengguna jalan terkait ketertiban dan keselamatan mereka.

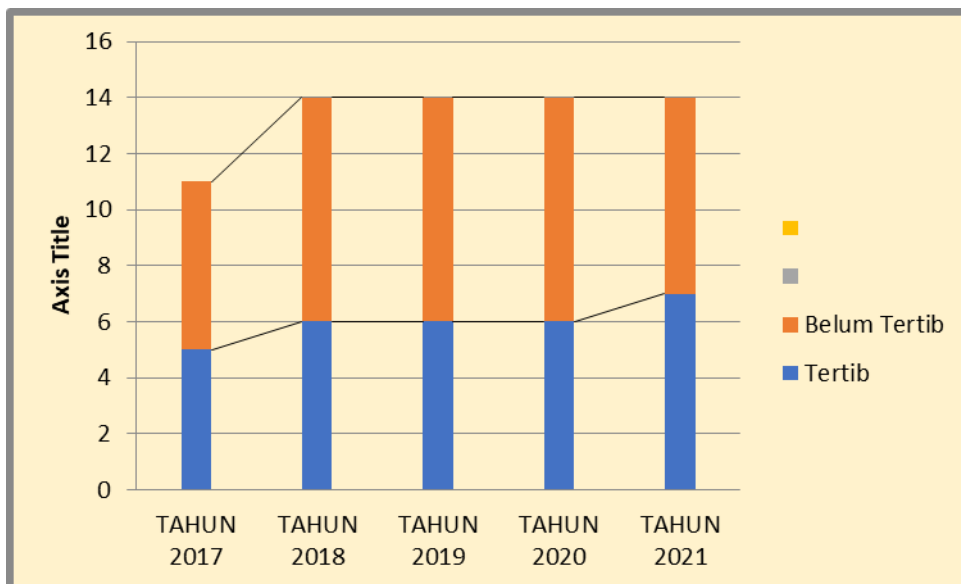


## 2. Indikator : Titik Lokasi Parkir yang Tertib

Titik lokasi parkir yang tertib didasarkan pada indikator bahwa lokasi parkir telah dipasang rambu parkir dan atau fasilitas parkir. Data pada tahun 2017, 11 titik lokasi parkir dengan 5 lokasi tertib, pada 2019 dan 2020, lokasi parkir 14 titik dengan 6 titik lokasi tertib.

Pada tahun 2021, 7 lokasi tertib dari 14 titik lokasi dari target 9 lokasi atau 78%., Asumsi tertib ketika terdapat rambu parkir dan atau terdapat petugas parkir. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan, bertambahnya pusat keramaian dan juga kapasitas petugas parkir.

**Chart III.11**  
Ketertiban Titik Lokasi Parkir, Tahun 2017-2021



Terkait sumber daya perparkiran, maka beberapa lokasi parkir dialihkan pengelolaan pada pihak ketiga. Diantara lokasi tersebut adalah lokasi parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Mandar, dan Pasar Wonomulyo dan beberapa Lokasi parkir masih proses lelang pengelolaan adalah lokasi parkir Pasar Sentral Pekkabata, Pasar Baru Polewali. Dalam konteks ini, pengelolaan perparkiran pada unit kerja Dinas Perhubungan pada pemantauan dan pengawasan lokasi.

**Tabel III.5**  
Titik Lokasi Parkir Tertib Tahun 2021

NO	Lokasi parkir	Kecamatan	Jenis		Keterangan	Persentase
			Area tepi Jalan	Area parkir khusus		
1	Taman Bahari	Polewali	√		Tertib	50%
2	Pasar Baru	Polewali	√		Tertib	
3	Kantor Samsat	Polewali		√	belum tertib	
4	Kantor Capil	Polewali		√	Tertib	
5	Pasar Sentral	Polewali	√		belum tertib	
6	Rumah Sakit	Polewali		√	Tertib	
7	Pasar Pelitakan	Pelitakan	√		belum tertib	
8	Pasar Wonomulyo	Wonomulyo	√		Tertib	
9	Pasar Luyo	Luyo	√		belum tertib	
10	Pasar Tinambung	Tinambung	√		belum tertib	
11	Kantor Lapas Alun- Alun Polewali	Polewali		√	belum tertib	
12	Polewali	Polewali	√		Tertib	
13	Puskesmas Wono Pasar Malam	Wonomulyo	√		Tertib	
14	Tinambung	Tinambung	√		belum tertib	

Meskipun kinerja cukup tinggi, tetapi terkait parkir ada beberapa faktor yang tidak bisa dipisahkan. Asumsi bahwa parkir sangat terkait erat dengan pelayanan dan keamanan kendaraan merupakan diantara beberapa asumsi yang berkembang. Padahal kalau kita bicara perparkiran, sandaran hukumnya tetap pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi ukuran kinerjanya tetap pada teraturnya kendaraan demi lalu lintas angkutan jalan yang tertib dan aman.

## Sumber daya, Kendala dan Solusi

### Indikator Titik Rawan Kecelakaan dan Kepadatan Tertib Aman

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.6

PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN 2021					
INDIKATOR PERSENTASE TITIK RAWAN KECELAKAAN YANG TERTIB DAN AMAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	315,332,600	315,307,600	315,307,600	99.99
1	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>102,800,000</b>	<b>102,800,000</b>	<b>102,800,000</b>	<b>100.00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	102,800,000	102,800,000	102,800,000	100.00
2	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>212,532,600</b>	<b>212,507,600</b>	<b>212,507,600</b>	<b>99.99</b>
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00
	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	202,532,600	202,507,600	202,507,600	99.99

### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Target kinerja 68.57% dan realisasi 70%, artinya capaian kinerja Persentase Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman mencapai 102.19%. Dari sisi realisasi Anggaran terealisasi 99.99 % dari total anggaran 315.332.600

Kendala dan solusi terkait indikator titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman seperti tertera di bawah ini :

#### KENDALA

- Vaksinasi Covid 19
- Banyaknya titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar, sangat terkait banyak faktor terutama Penerangan Jalan Umum (PJU) dan kinerja pemenuhan PJU ini tidak berada dalam wilayah kerja Dinas Perhubungan;
- Banyak titik rawan kecelakaan yang berada jauh dari pusat kota, sehingga menyulitkan untuk penertiban lalu lintas;
- Masih seringnya kendaraan parkir di badan jalan, sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan dan mengganggu arus lalu lintas;
- Kuantitas dan kualitas Petugas lapangan yang masih terbatas dan termasuk status petugas lapangan yang PTT.



## SOLUSI

- Analisis dan survei titik rawan kecelakaan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas rambu-rambu lalu lintas sebagai sarana keselamatan jalan;
- Melakukan rekayasa lalu lintas dan komunikasi dengan Satlantas Polres Polewali Mandar terkait penertiban arus lalu lintas;
- Melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang parkir di badan jalan Nasional, dan melakukan kajian terkait upaya pemasangan teknologi pengawasan arus lalu lintas / CCTV;
- Menekankan kedisiplinan tugas lapangan serta pendekatan kekeluargaan terhadap petugas lapangan Dinas Perhubungan.

## Persentase Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman



**Target 68,57%**  
**Realisasi 70%**  
**Kinerja 102,19%**







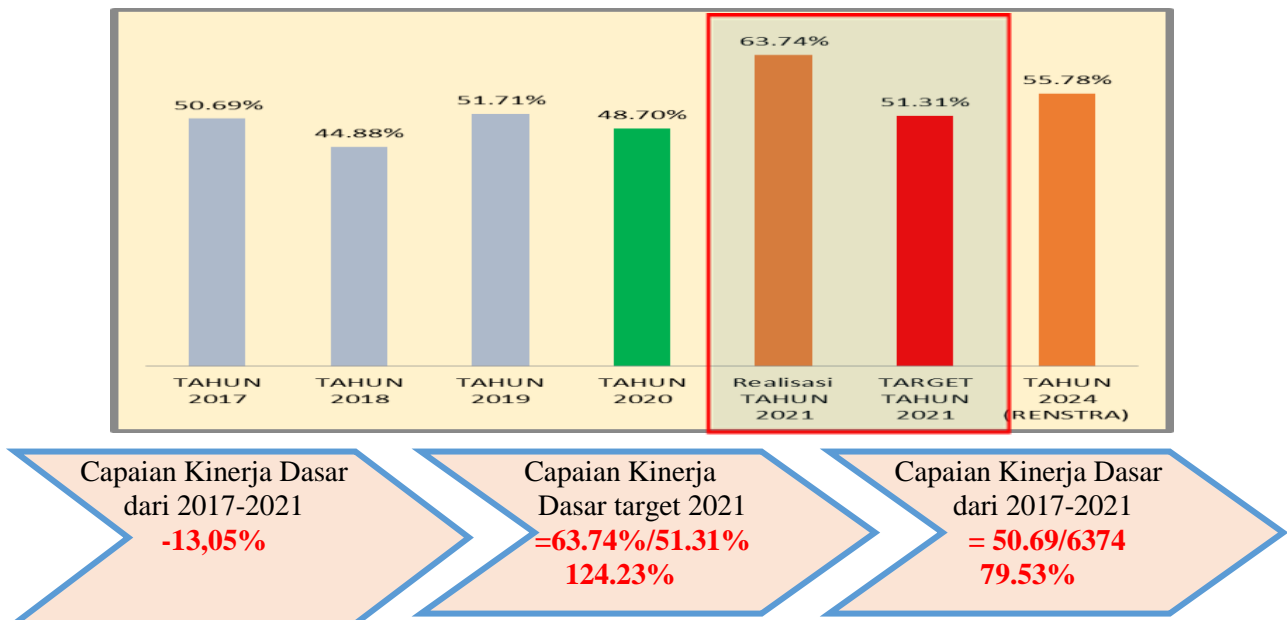
## Indikator Program

### Persentase Angkutan Umum yang Sesuai Standar Keselamatan

Target  
**51,31%**

Chart III.12

Angkutan umum yang Sesuai Standar Keselamatan, Tahun 2017-2021 dan capaian kinerja terhadap akhir tahun Renstra



Pada tahun 2021, persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, target 51.31% realisasi 63.74% capaian kinerja 124.23%. Hal ini

diperoleh dari realisasi uji KIR 80.43% dan pelayanan angkutan melalui kendaraan dan penumpang keluar-masuk terminal Wonomulyo sebesar 46,99%. Capaian kinerja dasar rentang 2017-2021 mencapai 13.05%. Capaian tahun 2011 mencapai 82.27% bila disandingkan dengan target akhir tahun Renstra pada 2024.

Selisih angka dari target yang ditetapkan dan penurunan persentase realisasi pada tahun 2021 disebabkan karena adanya kenaikan Tarif angkutan dan pengujian kendaraan bermotor tidak beroperasi selama dua (1) bulan.

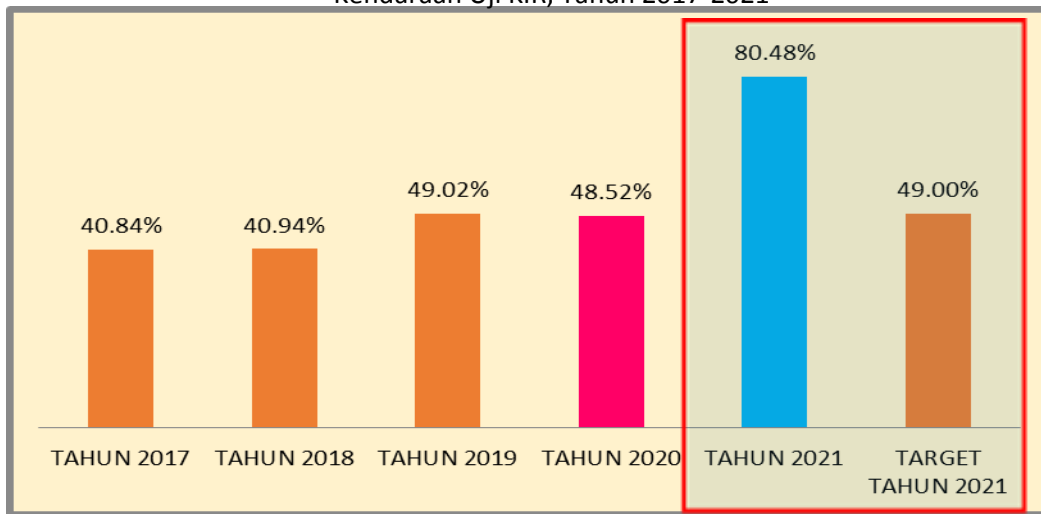
Angkutan umum yang sesuai standar keselamatan diukur berdasarkan kendaraan yang telah lulus uji KIR dan tingkat pelayanan angkutan. Hal ini didasarkan pada bahwa ketika kendaraan telah lulus uji KIR berarti secara fisik kendaraan sudah memenuhi standar kelaikan jalan, karena telah melewati serangkaian uji pada beberapa bagian kendaraan seperti rem, lampu, kaca dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat pelayanan angkutan, bahwa kendaraan akan beroperasi keluar-masuk terminal ketika standar kelaikan terpenuhi dan juga beberapa fasilitas terkait kenyamanan dan keamanan penumpang bisa mereka lengkapi.

Fluktuasi realisasi standar keselamatan angkutan umum dikarenakan terjadi pula ketidakstabilan kendaraan wajib uji dan rasio antara angkutan dan penumpang yang keluar-masuk terminal. Operasional kendaraan pribadi sebagai angkutan umum dan banyak kendaraan numpang uji merupakan diantara faktor fluktuasi angka realisasi indikator.

### **1. Indikator : Jumlah Kendaraan Uji KIR**

Pada tahun 2021, realisasi kendaraan yang melakukan uji KIR mencapai 80.48% dari target 49,50%. Dengan begitu berarti capaian kinerja jumlah kendaraan uji KIR di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Polewali Mandar pada tahun 2021 yaitu 164.64%.

**Chart III.13**  
Kendaraan Uji KIR, Tahun 2017-2021



Menghitung capaian realisasi kinerja kendaraan uji KIR didasarkan pada jumlah kendaraan uji KIR dibagi kendaraan wajib uji. Untuk tahun 2021, kendaraan wajib uji sama dengan pada tahun 2020 menurun yakni 3571 unit.

Sederhananya, pada tahun 2021, kendaraan yang melakukan uji KIR 2874 dengan kendaraan wajib uji 3571 berarti persentasenya 80,48%. Angka ini sebenarnya naik dibanding tahun 2020 yang realisasi kendaraan uji KIR 2149 unit dengan kendaraan wajib uji 3571 yang persentasenya 49,02%. Proyeksi tahun 2021 ini didasarkan pada data capaian 2021,

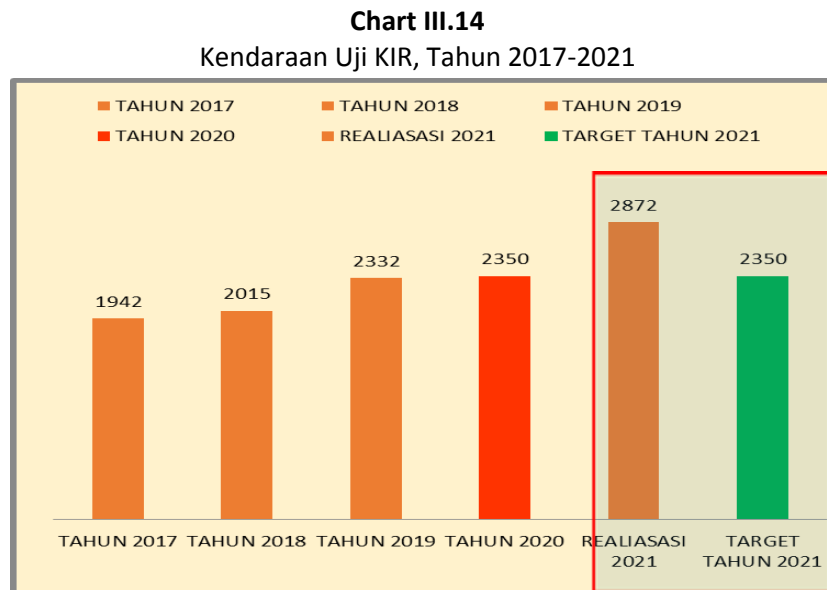
Seiring dengan menlandainya config 19 kinerja pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar prospektif dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, seperti pada data berikut ini :

**Tabel III.7**  
Kendaraan Laik Jalan 2017-2021

KENDARAAN LAIK JALAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Kendaraan Uji KIR	1942	2059	2332	2308	2872
Kendaraan Wajib Uji	4755	5029	4757	4757	3571
<b>PERSENTASE</b>	<b>40.84%</b>	<b>40.94%</b>	<b>49.02%</b>	<b>48.52%</b>	<b>80.43%</b>

Tabel di atas menunjukkan bagaimana perbandingan antara kendaraan yang diuji dengan kendaraan wajib uji. Setiap tahun terus mengalami lonjakan

persentase,. Detail jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR pada tahun 2021 sebagaimana chart di bawah ini :



**Tabel III.8**  
Kendaraan Uji KIR Tahun 2021

NO	BULAN	JENIS KENDARAAN											LM KENI	KET	
		MPU	MOBIL BUS			MOBIL BARANG									
			BESAR	SEDANG	KECIL	TRUCK 6 RODA KEAT	TRUCK 6 RODA	TRUCK 4 RODA	PICK UP	KEND. RODA 3	KEND. KHUSUS	GANDENG/TEMPEL			
1	JANUARI													0	
2	FEBRUARI	2	1	0	3	32	66	1	194					299	
3	MARET	2	5	2	3	23	100	2	278					415	
4	APRIL	1	1	0	4	28	69	2	186					291	
5	MEI	1	0	0	2	39	32	0	181					255	
6	JUNI	0	0	0	2	44	55	2	206					309	
7	JULI	2	0	0	4	43	57	1	200					307	
8	AGUSTUS	0	1	0	3	48	92	1	279					424	
9	SEPTEMBER	0	0	0	3	48	107	1	261					420	
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
11	NOVEMBER	0	0	0	0	1	3	0	2					6	
12	DESEMBER	1	2	1	4	43	79	0	16					146	
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>349</b>	<b>660</b>	<b>10</b>	<b>1803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2872</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji KIR adalah mobil Pick-Up dan disusul jenis-jenis mobil yang lain.

Kendaraan roda tiga yang dimaksud di atas bukanlah Bentor, melainkan kendaraan roda tiga yang lain seperti motor pengangkut sampah.

Pada tahun 2021, rata-rata Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar, menguji 12 unit kendaraan dengan rasio pembagi 235 hari kerja dalam setahun.

Dalam proses peningkatan pelayanan dan demi standar kualitas dan akurasi alat uji, maka Kementerian Perhubungan RI telah mensyaratkan bahwa setiap Pengujian Kendaraan Bermotor wajib melakukan kalibrasi alat uji dan uji sertifikasi. Terkait kalibrasi dan pelayanan serta komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2021, juga sudah dilakukan pemeliharaan beberapa alat uji.

Pada tahun 2021 pula, pengujian kendaraan bermotor Polewali Mandar merupakan satu-satunya pengujian kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Barat yang terakreditasi. Dalam artian, hanya Pengujian kendaraan Polewali Mandar yang boleh melakukan uji kendaraan di Provinsi Sulawesi Barat.



(19/08/2020) Kepala Dinas Perhubungan Kab. Polman menerima kunjungan Dinas Perhubungan Provinsi di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

@dishubpolman | dishub.polewali.mandar | http://dishub.polmakab.go.id | Dishub Polman Karang

Sertifikat Nomor : 413/SM.304/DRJD/2020



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
SERTIFIKAT AKREDITASI  
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1433/AJ.502/DRJD/2020 tanggal 16 Maret 2020 menyatakan bahwa :

Nama UPUBKB : UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
 Alamat : Kompleks Terminal Tiplayo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat  
 Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar

Terakreditasi dengan klasifikasi :

**AKREDITASI B (Bersyarat)**

Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal **16 Maret 2020** sampai dengan **16 Maret 2022**.

Jakarta, 27 Maret 2020

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**Drs. BUDI SETYADI, SH., M.Si**  
NRP. 6205 0784

Setelah Kalibrasi dilakukan pada tiap tahun, pada 16 Maret 2020, Pengujian Kendaraan Kabupaten Polewali Mandar telah terakreditasi B (Bersyarat) dengan beberapa peralatan yang mesti diupgrade kapasitasnya. Terkait hal tersebut, tim Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar telah mengupayakan berbagai kekurangan dokumen dan persyaratan lain dan hingga kini, tinggal menunggu hasil verifikasi dari pihak Kementerian Perhubungan RI.

Terkait Kalibrasi dan Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor, berdasarkan surat edaran Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019 bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak memiliki penetapan akreditasi dari Dirjen Perhubungan Darat dan belum menetapkan Buku Lulus Uji Elektronik (BLUE) sampai dengan batas waktu 31 Desember 2019, maka Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut dilarang untuk menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Terkait hal tersebut, maka pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Polewali Mandar telah menggunakan Blue berupa kartu sebagai bukti lulus uji.

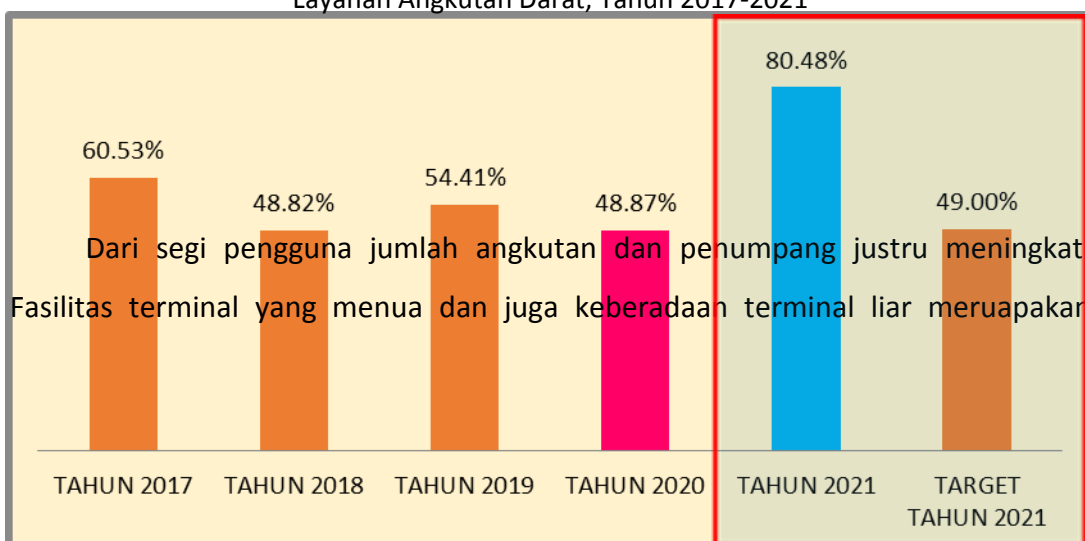
Di Provinsi Sulawesi Barat, hanya pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Polewali Mandar yang telah kalibrasi dan mengajukan akreditasi, maka ke depan peluang untuk meningkatkan jumlah kendaraan yang uji berkala di Kabupaten Polewali Mandar menjadi terbuka lebar.

## 2. Indikator : Jumlah Angkutan dan Penumpang yang Keluar-Masuk Terminal

Berdasarkan kewenangan, Kabupaten Polewali Mandar mengelola Terminal Tipe C, yakni Terminal Wonomulyo. Indikator pelayanan angkutan juga berdasar pada jumlah angkutan dan penumpang yang keluar-masuk terminal. Pada tahun 2021, target 49% dari 22.000 unit angkutan dan 20.200 orang penumpang yang keluar-masuk terminal dan terealisasi 80.48%, artinya kinerja mencapai 131.18%.

Angka ini naik dibanding capaian persentase pada tahun 2020 yang mencapai angka 48.87%. seiring dengan melandainya pandemi Covid-19 telah berpengaruh besar terhadap pemanfaatan angkutan umum pedesaan maupun terminal di Wonomulyo.

**Chart III.15**  
Layanan Angkutan Darat, Tahun 2017-2021



diantara problem pemanfaatan terminal tipe C Wonomulyo yang belum begitu

LAYANAN ANGKUTAN DARAT	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Angkutan keluar-masuk terminal	6010	28208	35942	15742
Penumpang keluar-masuk terminal	12310	51848	73541	33501
Rasio : Penumpang/Angkutan	2.0	1.8	2.0	2.1
<b>PERSENTASE</b>	<b>48.82%</b>	<b>54.41%</b>	<b>48.87%</b>	<b>46.99%</b>

optimal. Hal lain tentu, sebagai alat transportasi utama masyarakat Polewali Mandar.

**Tabel III.9**

Layanan Angkutan Darat Tahun 2017-2021

Dari tabel di atas, rasio layanan angkutan umum pada tahun 2021 yakni 2,1, meningkat dibanding pada tahun 2020 yang hanya 2.0. Rasio ini dimaknai sebagai keterpenuhan angkutan oleh penumpang.

**Tabel III.10**

Angkutan dan Penumpang Keluar-Masuk Terminal Wonomulyo Tahun 2021

URAIAN	SATUAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
Terminal Wonomulyo														
Angkutan	Unit													
Masuk		830	970	600	589	688	602	492	480	650	772	517	550	7740
Keluar		830	970	600	589	688	602	492	480	650	772	517	550	7740
Jumlah		1660	1940	1200	1178	1376	1204	984	960	1300	1544	1034	1100	15742
Penumpang	Orang													
Masuk		2272	1699	1537	799	1394	1268	1064	1057	1298	1657	1103	1110	
Keluar		2270	1884	1535	982	1391	1266	1065	1066	1299	1662	1108	1115	
Jumlah		4542	3583	3072	1781	2785	2534	2534	2534	2534	2534	2534	2534	33501
Rasio		2.74	1.85	2.56	1.51	2.02	2.19	2.14	2.08	2.12	2.15	2.31	1.92	2.13

Dari tabel tersebut dapat dicermati bahwa rasio tertinggi layanan angkutan darat terjadi pada bulan Januari yakni 2,74 dan terendah pada bulan April dengan rasio 1,51. Secara keseluruhan rasio penumpang dari setiap angkutan selama tahun 2021 adalah 2 sampai 3 orang penumpang.

Rasio layanan angkutan darat dapat dibaca bahwa rata-rata angkutan darat terutama angkutan pedesaan dan perkotaan yang keluar-masuk di Terminal



Wonomulyo hanya memuat 1 atau 2 penumpang. Ini disebabkan karena meningkatnya pemanfaatan kendaraan pribadi di Kabupaten Polewali Mandar, terutama kendaraan roda dua/motor. Keberadaan Bentor yang semakin efektif melayani masyarakat, juga menjadi salah satu penyebab meskipun secara standar keselamatan sangat minim. Belum lagi mulai berkembangnya jasa transportasi berbasis aplikasi, ini memberikan pengaruh yang tidak sedikit terhadap pemanfaatan Terminal tipe C Wonomulyo.

pada tahun 2021, disaat config 19 sudah mulai berkurang mobilitas orang dan angkutan, mulai menunjukkan kenaikan jumlah penumpang terhadap pemanfaatan terminal, tak terkecuali terminal tipe C Wonomulyo.



### 3. Indikator : Jaringan Trayek Efektif

Trayek merupakan diantara hal tak terpisahkan dari keberadaan angkutan umum. Rute ini menjadi salah satu indikator bagaimana manajemen angkutan sesuai standar keselamatan angkutan publik dikelola dan ditata dengan terencana. Jumlah penumpang dan keberadaan kendaraan pribadi merupakan tantangan tersendiri dari operasional trayek angkutan dan jumlah angkutan sendiri.

Fenomena angkutan umum berbasis aplikasi juga menjadi sesuatu tak terbantahkan dari perkembangan dan dinamika dunia transportasi.

Meskipun begitu, keberadaan angkutan pedesaan merupakan fakta yang mesti dikelola operasionalnya. Diantara gempuran tantangan yang tersebut di atas, keberadaan angkutan umum di Kabupaten Polewali Mandar juga memberikan kontribusi optimal bagi mobilitas orang dan barang, diantara salah satunya adalah dengan menata dan mengefektifkan jaringan trayek.

Terdapat beberapa jaringan trayek efektif di Kabupaten Polewali Mandar yakni yang berada di Jalan Poros Nasional. Hal ini dikarenakan akses jalan dan jumlah penumpang yang lebih potensial di jalan poros. Sementara trayek yang berada di pedesaan keberadaannya insidental sesuai keperluan penumpang maupun kepentingan angkutan terkait. Meskipun begitu, penataan tetap penting dilakukan untuk memberikan identitas rute angkutan umum di Polewali Mandar.



Tahun 2021, terdapat tiga (3) trayek angkutan umum di Polewali Mandar yang ditertibkan yakni, trayek Polewali – Wonomulyo, Wonomulyo – Tinambung dan Wonomulyo – Tapango. Diantara ketiga trayek tersebut terdapat 50 unit angkutan umum pedesaan yang menjadi sasaran kegiatan. Kegiatan ini sesuai dengan target yakni tiga (3) trayek tertib dari target 100 unit angkutan umum,

dilakukan penertiban 357 unit tertib penggunaan trayek di dalam artian capaian kinerja mencapai 357%. Kegiatan ini dilakukan dilakukan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan penertiban.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga standar keselamatan dari pelayanan angkutan. Kejelasan trayek akan memberikan jaminan bagi penumpang akan ketersediaan tujuan dan juga identitas khusus bagi angkutan umum menempuh rute serta jaminan aksesibilitas angkutan bagi mobilitas orang dan barang di Kabupaten Polewali Mandar.

#### 4. Indikator : Angkutan Umum yang ditertibkan

Konsep awal kegiatan ini adalah penertiban operasional di jalan raya dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen KIR dan trayek. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan tertib dokumen resmi operasional kendaraan.

Target kegiatan pada tahun 2021 ini menysasar pada 100 unit angkutan umum, dengan melakukan pemeriksaan Bersama polres polman dapat dilakukan penertiban 375 unit kendaraan umum, jadi capaian kinerja pada indikator ini 375%.

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III.11**  
Realisasi Anggaran  
Indikator Persentase Angkutan Umum yang Sesuai Standar Keselamatan Tahun 2021

PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN 2021				
INDIKATOR PERSENTASE ANGKUTAN PUBLIK YANG MEMENUHI STANDAR KESELAMATAN				
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>118,875,900</b>	<b>118,875,900</b>	<b>118,875,900</b>	<b>100.00</b>
<b>1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>87,100,000</b>	<b>87,100,000</b>	<b>87,100,000</b>	<b>100.00</b>
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	87,100,000	87,100,000	87,100,000	100.00
<b>2 Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>98,875,900</b>	<b>98,875,900</b>	<b>98,875,900</b>	<b>100.00</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	66,875,900	66,875,900	66,875,900	100.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100.00
<b>3 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00</b>
Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pesyaratan dan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00
<b>4 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00

## Vaksinasi config 19 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari target kinerja angkutan umum sesuai standar keselamatan sebesar 51.31% dan hanya terealisasi 67.74% dalam artian kinerja mencapai 124.22%. anggaran sebesar 16.00% dari total anggaran awal Rp. 118.875.900 terealisasi 100%

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator kinerja angkutan umum yang sesuai standar keselamatan pada tahun 2020, terlihat pada gambaran di bawah ini :

### KENDALA

- Vaksinasi Covid-19
- Tumbuhnya kendaraan pribadi sebagai angkutan umum, termasuk Bentor;
- Lemahnya kesadaran pengguna kendaraan atau pengusaha angkutan untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor sebagai sarana mengukur tingkat standar keselamatan kendaraanya;
- Minimnya pemanfaatan terminal oleh angkutan umum dan penumpang, ini terkait dengan fasilitas yang masih minim, sehingga mirip sebagai terminal lintasan;
- Kapasitas Petugas lapangan Dinas Perhubungan yang masih terbatas dan termasuk status petugas lapangan yang PTT.



### SOLUSI

- Penyesuaian kerja dan ikut dalam kegiatan penanganan pandemi
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Kepolisian terutama Satlantas Polres Polewali Mandar untuk penertiban angkutan umum;
- Melakukan inspeksi dan pengawasan terkait KIR kendaraan angkutan umum

selain terus melakukan pembenahan sarana prasarana terkait alat uji, disamping melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap pengguna jalan terkait keselamatan berlalu lintas;

- Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap angkutan umum serta koordinasi dengan Polsek Wonomulyo dan Babinsa terkait pemanfaatan Terminal Wonomulyo;
- Menekankan kedisiplinan tugas lapangan serta pendekatan kekeluargaan terhadap petugas lapangan Dinas Perhubungan

## **Persentase Angkutan Umum yang Sesuai Standar Keselamatan**



**Target 51,31%**

**Realisasi 63,74%**

**Kinerja 124,22%**



# SASARAN 2

## Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator

**Indeks Kepuasan Masyarakat**

Target

**BAIK**

Pelayanan Dinas Perhubungan bertumpu pada beberapa unit kerja; perparkiran, pelayanan terminal, pengujian kendaraan bermotor. Meskipun begitu, terdapat pula pelayanan yang bersentuhan langsung manajemen perkantoran Dinas. Untuk melihat kualitas manajemen perkantoran dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Jumlah responden berdasarkan hasil kuisioner sebanyak 150 orang, jumlah tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dengan dasar “ (Jumlah Unsur + 1) x 10 atau (14 +1) x10 = 150 Responden. Responden dipilih secara acak.

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM didapatkan dari nilai rata-rata tertimbang masing-masing ke 14 unsur pelayanan. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = 1 = 0,071$$

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai IKM dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsure yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian dikonversi dengan nilai dasar 25, dengan rumus : IKM unit pelayanan x 25.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,73	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,74 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,25 – 100,00	A	Sangat Baik

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus :

- Jumlah nilai per-unsur pelayanan = skor x frekuensi
- Jumlah nilai rata-rata per-unsur =  $\frac{\text{Jumlah nilai per-unsur pelayanan}}{\text{Responden}}$
- Nilai indeks = total jumlah nilai rata-rata

Hasil pengolahan data didapatkan jumlah nilai sebagai berikut :

JUMLAH NILAI PER UNSUR PELAYANAN													
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14
459	456	458	455	455	456	454	454	453	455	456	459	453	515

JUMLAH NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN													
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,4

JUMLAH NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN x 0,071													
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Dari data table tersebut setelah diolah menggunakan rumus didapatkan nilai seperti di bawah ini :

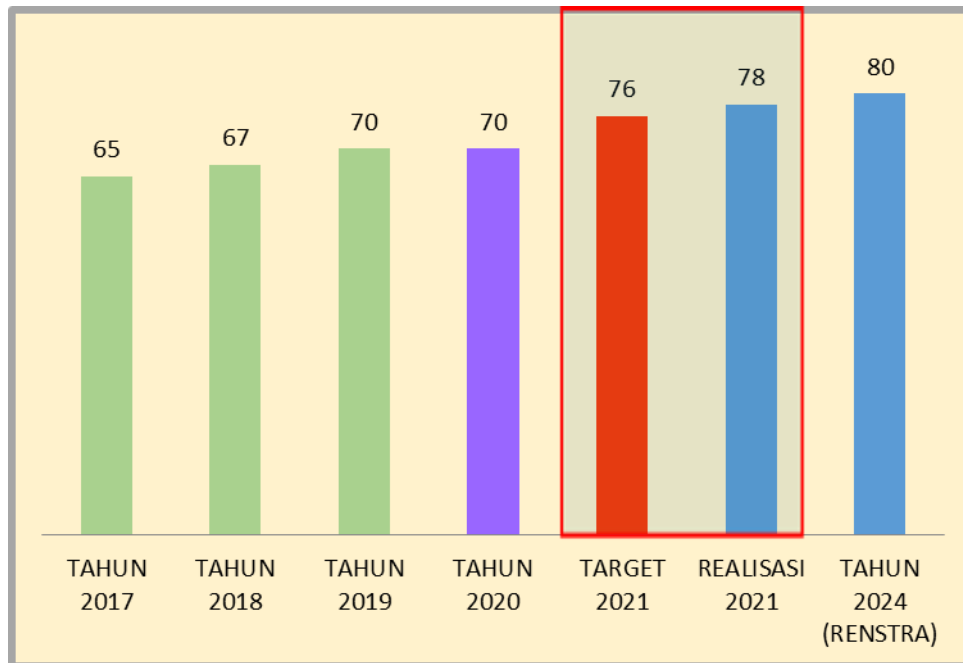
- a. Nilai IKM setelah dikonversi = nilai indeks x 25 = 30 x 25 = 75
- b. Mutu pelayanan = B
- c. Kinerja unit pelayanan = Baik

Tabel III.12

RENCANA TINDAK LANJUT SURVEY INDEKS KEPuasan NASABAH SALURAN PERHUBUNGAN KABUPATEN POLEWALI MANDIA TAHUN 2021	
Jenis Pelayanan: <b>NILAI IKH</b> (Setelah dikonversi)  <h1 style="text-align: center;">75</h1> Mutu Pelayanan: B Kinerja Unit Pelayanan: Baik	
<b>RESPONDEN</b> Jumlah : 3 orang Jenis Kelamin Laki-laki : 3 orang Perempuan : 0 orang Pendidikan SD : 0 orang SMP : 3 orang SMA : 3 orang D1,D2,D3 : 0 orang S1/DIV : 0 orang S2 : 0 orang S3 : 0 orang Lainnya : 0 orang	
<b>Persyaratan</b>	<b>WAKTU SURVEY</b> 10 Juni sampai 30 Juli 2019
Prasadur Pelayanan 3.0 Persyaratan Pelayanan 3.0 Kejelasan Petugas Pelayanan 3.0 Kedisiplinan Petugas pelayanan 2.9 Tanggung Jawab Petugas Pelaya 3.0 Kemampuan Petugas Pelayanan 3.0 Kecepatan Pelayanan 2.9 Keadilan Mendapatkan Pelayan 3.0 Kerapuhan dan Keramahan Petu 3.0 Keajajaran Biaya Pelayanan 3.0 Kepastian Biaya Pelayanan 3.0 Kepastian Jadwal Pelayanan 3.0 Kenyamanan Lingkungan 3.0 Kenyamanan Pelayanan 3.4 <b>NILAI RATA - RATA PER UNSUR</b> <b>TERTIBANG 80,071</b> 2.8	
<b>RENCANA TINDAK LANJUT</b>	
1. Meningkatkan Kedisiplinan Petugas Pelayanan 2. Meningkatkan Kecepatan Pelayanan 3. Mengefektifkan Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Mengoptimalkan Kepastian Jadwal Pelayanan 5. Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan	



**Chart III.16**  
 Nilai Konversi IKM, Tahun 2017-2021 dan target akhir tahun Renstra



Kinerja pelayanan berdasarkan survei IKM Dinas Perhubungan, tahun 2017-2021 mengalami peningkatan 6 poin dengan capaian kinerja 7,69%. Selama tahun 2021 melampaui target dan realisasi, begitu juga dengan capaian kinerja mencapai 102%. Dan jika di bandingkan dengan target renstra Capaian ini, damerupakan 98% dari target akhir tahun Renstra pada tahun 2024.

**Sumber daya, Kendala dan Solusi**  
**Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat**

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III.13**  
Realisasi Anggaran  
Indikator IKM Tahun 2021

### **Pandemi Covid 19 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dari target indeks kepuasan masyarakat sebesar dengan poin 76 dan hanya terealisasi 78 poin dalam artian kinerja mencapai 102%. Meskipun begitu, penilaian ini termasuk kategori BAIK, sehingga sesuai target. Pandemi Covid-19 telah mengubah segala orientasi.

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator IKM pada tahun 2021, terlihat pada gambaran di bawah ini :

#### **KENDALA**

- Vaksinasi Pandemi Covid-19
- Sarana prasarana pelayanan dalam kondisi butuh banyak perbaikan;
- Gedung kantor yang kurang layak;
- Kapasitas Petugas pelayanan yang masih terbatas dan berstatus PTT.



#### **SOLUSI**

- Penyesuaian kinerja
- Memaksimalkan penataan dan perbaikan sarana prasarana pelayanan;
- Pemeliharaan gedung kantor;
- Menekankan kedisiplinan serta pendekatan kekeluargaan terhadap petugas



## **SASARAN 3**

### **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator

**Predikat SAKIP**

Target

**BB**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dapat dilihat dari perencanaan kinerja yang terdiri dari Renja, RKA-DPA dan pelaporan akuntabilitas. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dilakukan untuk mengeksekusi program kegiatan dari sebuah DPA. Perencanaan Kinerja dilakukan secara bertahap yang diakhiri oleh PK dan Rencana Aksi. Pengukuran kinerja juga dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran dan indikator serta target yang telah ditentukan. Laporan Kinerja tahunan berupa LAKIP yang diakhiri dengan review oleh Inspektorat. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan sebagai berikut :

TAHUN	PREDIKAT
TAHUN 2017	C
TAHUN 2018	C
TAHUN 2019	B
TAHUN 2020	BB
TAHUN 2021	A
TAHUN 2024 (RENSTRA)	A

Berdasarkan pada hal di atas bahwa rentang tahun 2017-2011, terdapat peningkatan predikat SAKIP. Dari yang stagnan pada 2017-2018 pada predikat nilai C, maka 2018-2019 meningkat menjadi B pada tahun 2020 dengan predikat BB dan pada Tahun 2021 dapat mempertahankan posisi pada Predikat BB. hal ini belum mencapai tarhet akhir tahun Renstra, yakni predikat A.

### Sumber daya, Kendala dan Solusi

#### Indikator Predikat SAKIP

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III.14**  
Realisasi Anggaran  
Indikator Predikat SAKIP Tahun 2021

No.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
	INDIKATOR PREDIKAT SAKIP	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	100%

#### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja Predikat SAKIP dengan Predikat BB, merupakan realisasi yang sesuai target. Dari sisi realisasi program kegiatan terlaksana 100%.

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator Predikat SAKIP pada tahun 2021, terlihat pada gambaran di bawah ini :

## KENDALA

- Vaksinasi Config 19
- Pengelolaan data dan kinerja perencanaan yang sentralistik; pada subag perencanaan;
- Pengukuran kinerja dan transparansi penilaian SAKIP belum optimal.



# SASARAN 3

## Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator

### Opini Pengelolaan Keuangan

Target

**WTP**

Berdasarkan pada capaian Opini WTP Kabupaten Polewali Mandar dalam 2 tahun terakhir, maka diharap Dinas Perhubungan menjadi bagian integral dari bersihnya pengelolaan keuangan perangkat daerah.

#### Sumber daya, Kendala dan Solusi

##### Indikator Opini Pengelolaan Keuangan

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel III.15**

Realisasi Anggaran

Indikator Opini Pengelolaan Keuangan Tahun 2021

No.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
	INDIKATOR PREDIKAT WTP	Rp 3,000,400.00	Rp 3,000,400.00	Rp 3,000,400.00	100%
	<b>Adminitrasi keuangan perangkat Daerah</b>	<b>3,000,400.00</b>	<b>3,000,400.00</b>	<b>3,000,400.00</b>	<b>100%</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,400	2,000,400	2,000,400	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%

#### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja Opini Pengelolaan Keuangan selalu merujuk pada capaian kinerja pengelolaan keuangan Daerah yang WTP. Untuk mendukung hal tersebut, realisasi program kegiatan terkait pengelolaan keuangan terlaksana 100% dan capaian kinerja mencapai 100%.

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator Opini Pengelolaan Keuangan pada tahun 2021, terlihat pada gambaran di bawah ini :

## KENDALA

- Vaksinasi Config 19
- Besarnya risiko pengelola keuangan;
- Minimnya pembekalan kapasitas pengelola keuangan;
- Belum optimal administrasi pengelolaan aset.



## SOLUSI

- Penyesuaian kerja
- Optimalisasi pendampingan terhadap pengelola keuangan perangkat daerah ;
- Rutinitas pembekalan kapasitas pengelola keuangan;
- Terus mengupayakan komunikasi dan koordinasi terkait pencatatan aset.

### B. Akuntabilitas Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

#### 1. Realisasi Pendapatan Tahun 2021

Target pendapatan sebesar Rp 2.246.563.000,00 sementara realisasi Rp 434.421.500,00 kurang dari target Rp. 1.782.141.500,00. Artinya, realisasi PAD sebesar 19,34%.

**Tabel III.16**  
Target dan Realisasi PAD Tahun 2021

No.	URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA	
				KEKURANGAN	% REALISASI
1	Ret. Pengujian Kend.Bermotor	76,538,000	118,249,000	(41,711,000)	154.50%
2	Ret. Pemakaian Kekayaan daerah	30,000,000	-	-	100.00%
3	Retribusi Terminal	120,025,000	29,490,000	90,535,000	24.57%
	- T P R	100,000,000	9,410,000	90,590,000	
	- Sewa Ruang	20,025,000	20,080,000	(55,000)	
4	Ret. Tempat Parkir Khusus	2,000,000,000	283,832,500	1,716,167,500	14.19%
	- Parkir Khusus	-	156,000,000		
	- Parkir RSUD	-	55,832,500		
	- Parkir Pasar Wonomulyo		72,000,000		
5	Retribusi Izin Trayek	20,000,000	2,850,000	17,150,000	14.25%
<b>J U M L A H</b>		<b>2,246,563,000</b>	<b>434,421,500</b>	<b>1,782,141,500</b>	<b>19.34%</b>

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melebihi target dengan capaian 154.50%, sedangkan capaian paling rendah adalah Retribusi tempat Parkir Khusus hanya sebesar 14.19 %.

Hal tersebut dikarenakan bahwa potensi parkir RSUD yang tidak lagi di kelolah oleh dinas perhubungan melainkan sudah di kelola oleh pihak RSUD sendiri

Untuk target retribusi parkir, tahun 2021 terjadi lonjakan target Rp. 2.000.000.000 dari tahun 2020 Rp 1.600.000.000. Asumsi ini dikarenakan pengelolaan parkir di Pasar Sentral, Pasar Baru dan Pasar Wonomulyo yang akan dikelola oleh pihak ketiga namun pada tahun hanya pasar Wonomulyo yang di kelolah oleh pihak ketiga sedangkan parkir RSUD mengajukan permohonan untuk mengelola parkir di RSUD Polewali Mandar melalui BLUD ( Badan Layanan Umum Daerah).

Dari capaian target secara keseluruhan, terdapat kekurangan Rp. 1.782.141.500, hal tersebut terkait dengan pengelolaan parkir RSUD yang sudah mengelolah sendiri Retribus Parkirnya namun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya dengan selesainya tender pasar wonomulyo

## 2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021



PAGU anggaran sebesar Rp 5.315.481.398, realisasi Rp. 5.104.296.576,00 sisa anggaran sebesar Rp. 211.184.822,00 atau terealisasi sebesar 97,82%. Adapun perincian realisasi belanja daerah ini berasal dari :

### 1. Realisasi Belanja Operasional

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 5.315,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 3.302.523.170,30 atau terealisasi sebesar 96.03% dengan perincian terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 2.717.869.674,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 2.928.807.222,00 atau realisasi 92.80%;
- b. Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.153.031.152.00 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 2.153.031.152.00 atau realisasi 100%.

### 2. Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 149.163.024,00 apabila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp. 149.750,00 atau terealisasi sebesar 99.96% dengan perincian terdiri dari :

- a. Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi Rp. 149.163.024,00 dibandingkan anggaran Rp. 149.163.024,00 atau terealisasi sebesar 99.96%;

**Tabel III.17**  
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021

NO. REK.	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2021	LEBIH / KURANG	%
4	PENDAPATAN	2,246,563,000.00	434,421,500.00	1,812,141,500.00	19.34
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA				
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA				
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	2,246,563,000.00	434,421,500.00	1,812,141,500.00	19.34
	Pendapatan Lainnya				
5	BELANJA	5,315,481,398.00	5,104,296,576.00	211,184,822.00	96.03
5.1	BELANJA OPERASI	5,165,838,374.00	4,954,710,826.00	211,127,548.00	95.91
5.1.1	Belanja Pegawai	2,928,807,222.00	2,717,869,674.00	210,937,548.00	92.80
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,153,031,152.00	2,152,941,152.00	90,000.00	100.00
5.1.3	Belanja Bunga				
5.1.4	Belanja Hibah	84,000,000.00	83,900,000.00	100,000.00	99.88
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		
5.2	BELANJA MODAL	149,643,024.00	149,585,750.00	57,274.00	99.96
5.2.1	Belanja Modal Tanah			-	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149,643,024.00	149,585,750.00	57,274.00	99.96
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0.00	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	0.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3,068,918,398.00)</b>	<b>(4,669,875,076.00)</b>	<b>1,600,956,678.00</b>	<b>152.17</b>

### 3. Aset

#### a. Aset Tetap

Nilai aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan laporan keuangan *audited* tahun 2020 adalah Rp 13.923.479.100,00.

Perhitungan nilai aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.998.170.700,00 atau terdapat penambahan nilai aset tetap pada tahun 2021 sebesar Rp149.585.750,00 dan pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp Rp74.894.150,00 :

Saldo per tanggal 31 Desember 2020	Rp.	13.923.479.100,00
Penambahan di Tahun 2021	Rp.	149.585.750,00
Pengurangan Tahun 2021	Rp.	(74.894.150,00)
<b>Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.998.170.700,00</b>

#### b. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Dinas Perhubungan kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2020 terdapat penambahan senilai Rp33.474.000,00 dan mengalami pengurangan sebesar Rp33.474.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, Adapun rincian aset lainnya sebagai berikut :

Saldo per tanggal 31 Desember 2019	Rp.	0,00
Penambahan di Tahun 2021	Rp.	Rp33.474.000,00
Pengurangan Tahun 2021	Rp.	Rp33.474.000,00
<b>Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

Tabel III.18

Total Pagu dan Anggaran Tahun 2021

KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>2,424,644,176</b>	<b>2,424,513,296</b>	<b>2,424,513,296</b>	<b>100%</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>522,400,252</b>	<b>522,394,852</b>	<b>522,394,852</b>	<b>100%</b>
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.00
2 Administrasi Keuangan				100.00

	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>3,000,400</b>	<b>3,000,400</b>	<b>3,000,400</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,400	2,000,400	2,000,400	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00
3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>19,402,000</b>	<b>19,402,000</b>	<b>19,402,000</b>	<b>100.00</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	19,402,000	19,402,000	19,402,000	100.00
4	<b>Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>262,932,410</b>	<b>262,932,410</b>	<b>262,932,410</b>	<b>100.00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,996,600	4,996,600	4,996,600	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,986,600	21,986,600	21,986,600	100.00
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,620,000	29,620,000	29,620,000	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00
	Penyediaan Bahan/Material	18,065,910	18,065,910	18,065,910	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173,263,300	173,263,300	173,263,300	100.00
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4,979,000</b>	<b>4,979,000</b>	<b>4,979,000</b>	<b>100.00</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,979,000	4,979,000	4,979,000	100.00
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>118,085,742</b>	<b>118,083,742</b>	<b>118,083,742</b>	<b>100.00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33,086,500	33,084,500	33,084,500	99.99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38,999,242	38,999,242	38,999,242	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46,000,000	46,000,000	46,000,000	100.00
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>108,500,700</b>	<b>108,497,300</b>	<b>108,497,300</b>	<b>100.00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	83,501,000	83,501,000	83,501,000	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,999,700	19,996,300	19,996,300	99.98
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00
	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>1,902,243,924</b>	<b>1,902,118,444</b>	<b>1,902,118,444</b>	<b>99.99</b>
1	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>915,718,800</b>	<b>915,718,320</b>	<b>915,718,320</b>	<b>100.00</b>
	Pelaksanaan Penyusunan				100.00

	Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	915,718,800	915,718,320	915,718,320	
<b>2</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>465,216,624</b>	<b>465,116,624</b>	<b>465,116,624</b>	<b>99.98</b>
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	261,139,924	261,039,924	261,039,924	99.96
	Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan	204,076,700	204,076,700	204,076,700	100.00
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>87,100,000</b>	<b>87,100,000</b>	<b>87,100,000</b>	<b>100.00</b>
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	87,100,000	87,100,000	87,100,000	100
<b>4</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>102,800,000</b>	<b>102,800,000</b>	<b>102,800,000</b>	<b>100</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	102,800,000	102,800,000	102,800,000	100.00
<b>5</b>	<b>Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>98,875,900</b>	<b>98,875,900</b>	<b>98,875,900</b>	<b>100.00</b>
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	66,875,900	66,875,900	66,875,900	100.00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100.00
<b>6</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>212,532,600</b>	<b>212,507,600</b>	<b>212,507,600</b>	<b>99.99</b>
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00
	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	202,532,600	202,507,600	202,507,600	99.99
<b>7</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00</b>
	Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pesyaratan dan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00
<b>8</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran awal Dinas Perhubungan Tahun 2020 sebesar Rp. 1.887.028.100,00, tetapi terdapat refokushing untuk penanganan pandemi sebesar Rp. 719.396.106,00 atau sebesar 38,12%, sehingga anggaran riil menjadi Rp. 1.167.631.994,00 dengan realisasi 100%. Hal ini juga selaras dengan capaian program kegiatan fisik yang mencapai 100%.



## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 disusun untuk memaparkan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2021.

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 telah ditetapkan sasaran, program dan kegiatan dengan masing-masing indikatornya. Dari hasil analisa akuntabilitas dan pengukuran kinerja, maka dapat disimpulkan :

A. Sasaran : Meningkatnya kinerja transportasi dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas.

Tahun 2021, target 170 kejadian Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas), sementara Lakalantas yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 166 kasus, sehingga capaian kinerja 102%. Berdasarkan itu, maka angka Lakalantas Tahun 2021 mengalami penurunan 33% dari 223 kejadian pada tahun 2010.

Dari sisi fatalitas kejadian juga terjadi penurunan. Tahun 2021 terdapat penurunan jumlah korban meninggal dunia dari 40 korban pada tahun 2021 menurun menjadi 34 korban jiwa atau penurunan sampai pada angka 15%. Penurunan ini dampak dari mobilitas orang dan barang yang turun yang masih dalam kondisi Pandemi.

B. Indikator Program : Persentase sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik

Sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik, target kinerja 90,11% dan realisasi 99,10%, dalam artian capaian kinerja mencapai 99,76%.

Tahun 2021, sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan target 893 unit, realisasi 885 unit. Jumlah ini naik dari tahun 2020 yang berjumlah 823 unit.

- C. Indikator Program : Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman

Pada Tahun 2021, Titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman, target kinerja 68.10% dan realisasi 70%, dalam artian capaian kinerja mencapai 102.19%. Jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar yakni 60 titik.

- D. Indikator Program : Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan.

pada tahun 2021, angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, target 51.31% realisasi 67.74% capaian kinerja 124.22%. Hal ini terdiri dari persentase kendaraan uji KIR, realisasi 80.43% dan pelayanan angkutan darat di terminal realisasi 46.99%.

- e. Indikator sasaran pada segmen manajemen perkantoran, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan : IKM dengan mutu pelayanan A (Baik), Predikat SAKIP BB dan Opini Keuangan WTP;

- f. Realisasi keuangan, PAGU anggaran sebesar Rp 1.902.243.924.00, realisasi Rp 1.902.118.444, atau terealisasi sebesar 99.99%. Alokasi ini merupakan hasil emi Covid-19 telah mengubah segala orientasi, termasuk

- g. Terdapat 15 kegiatan pada 2 program: *pertama*, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 Kegiatan Pertama : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kedua Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ketiga Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah keempat Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah kelima Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah keenam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah ketujuh Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kedua Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan pertama Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota kedua Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ketiga Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C keempat Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kelima Pengujian Kendaraan Bermotor keenam Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota ketujuh Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan kedelapan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan saran atau rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Terkait angka kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar, baiknya lebih mengintensifkan pencegahan dengan inspeksi dan pengawasan serta pemasangan PJU;
2. Sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik, baiknya dipermantap kualitas dan kuantitasnya;
3. Titik rawan kecelakaan tertib dan aman, baiknya dilakukan pengawasan ketat dan optimalisasi rambu keselamatan lalu lintas;
4. Angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, baiknya melakukan terobosan untuk meningkatkan kuantitas kendaraan laik jalan dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan darat;
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perhubungan, baiknya dilakukan pembenahan terencana pada segmen sarana dan kualitas petugas pelayanan;
6. Terkait Predikat SAKIP A, baiknya dilakukan perencanaan secara integral seluruh elemen instansi dan secara berjenjang;



7. Opini WTP, baiknya diikuti dengan efisiensi penganggaran dan berorientasi pada tunjangan berbasis kinerja;
8. Terkait PAD, baiknya berbagai sektor juga ikut menyokong pencapaian kinerjanya disamping modernisasi perlengkapan pendukung dan efektifitas pengelolaan serta pengawasan yang didorong oleh kepastian regulasi.
9. Baiknya, pandemi disikapi dengan berbagai kegiatan efektif yang berorientasi pada keselamatan bersama dengan tetap mempertimbangkan aspek kinerja organisasi.

Pemaparan capaian kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan terhadap publik dan Pemerintah serta stakeholder lainnya. Laporan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan penyempurnaan strategi pencapaian sasaran kinerja.

Dengan Data capaian kinerja yang telah diuraikan pada laporan ini, serta kendala dan upaya-upaya yang telah dilakukan, diharapkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan semakin baik, sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.



## LAMPIRAN

- Lampiran 1 (Perjanjian Kinerja Dishub Tahun 2021)*
- Lampiran 2 (Pengukuran Kinerja Dishub Tahun 2021)*
- Lampiran 3 (Realisasi Anggaran Dishub Tahun 2021)*



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Mr. Muh. Yamin No.7 Pekkabata Kode Pos 91315  
Telepon. 0428-21943 Faks. 0428-21943

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dr. H. AKBAN AMRULLAH., MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MANDAR**  
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

**H. ANDI IBRAHIM MANDAR**

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PERHUBUNG

**Dr. H. AKBAN AMRULLAH., MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19740306 199302 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	TARGET 2021
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi	Angka Keolokaan Lalu Lintas	200 Kejadian	170 Kejadian
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi birokrasi	64,37%	70,37%
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Baik	Sangat Baik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	A
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.420.888.306,00	APBD
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 1.902.243.924,00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 5.323.143.230,00</b>	<b>APBD</b>

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,



**H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



**Drs. H. AKSAN AMBULLAH, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP 197403061993021001



## Lampiran 2; Pengukuran Kinerja Dishub 2021

ORTALA										Dinas Perhubungan
Hello, Dinas Perhubungan										Kembali
Dashboard										
Data										
Perencanaan Kinerja										
Pengukuran Kinerja										
Pengukuran Anggaran										
Pelaporan Kinerja										
Dinas Perhubungan										
Dashboard										
Data										
Perencanaan Kinerja										
Pengukuran Kinerja										
Pengukuran Anggaran										
Pelaporan Kinerja										
Evaluasi Kinerja										
Evaluasi RB										
Pelayanan Publik Non										
Logout										
PENGUKURAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN // Tahun 2020										
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja				Action		
				Target	Realisasi	(%)	Keterangan			
Tujuan : 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi										
1	Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah									
		1.1	Angka kecelakaan lalu lintas	KEJADIAN	200 KEJADIAN	168	116			
Tujuan : 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan										
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran									
		2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Predikat	BAIK	BAIK	100			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja									
		3.3	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100			
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah									
		4.4	Opini Pengelolaan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100			

***Lampiran 3;***  
***Realisasi Keuangan Dishub 2021***







